

MANAJEMEN KEPEMIMPINAN ISLAM

Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE.,MM.

**LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2017**

MANAJEMEN KEPEMIMPINAN ISLAM

Dilarang mengutip dan atau memperbanyak tanpa izin tertulis dari Penerbit sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, footprint, microfilm dan sebagainya

Penerbit :

**Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar
Jl. Sultan Alauddin Km 7 N0. 259 Makassar
Tlp. 0411-866972/Fax. 0411-865588**

Dicetak Oleh :

Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan
Universitas Muhammadiyah Makassar

Cet 1 : Lembaga Perpustakaan dan
Makassar Penerbitan Universitas
Muhammadiyah Makassar 2017
V-230 hlm : 15 x 23 cm
Biografi : Hlm, 119
ISBN : 978-602-8187-61-9

**Manajemen
Kepemimpinan Islam H. Abd. Rahman Rahim**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puja dan puji hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatNya kepada penulis sehingga penulisan buku ini “Manajemen Kepemimpinan Islam dalam Pengelolaan Keuangan Syari’ah yang Berkeadilan. Salam serta salawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW pembawa risalah Islam dan sebagai penegak dasar-dasar ekomomi berbasis syariah.

Buku ini merupakan hasil dari sebuah pemikiran manajemen kepemimpinan yang pada prinsipnya akan menajdi kuat apabila disinkronkan dalam nilai-nilai kepemimpinan Islam. Kepemimpinan dalam islam adalah kepemimpinan yang berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW, oleh karena itu sosok pemimpin yang disyariatkan adalah pemimpin yang beriman sehingga hukum-hukum Allah swt dapat ditegakkan dan diterapkan. Begitupula dalam kepemimpinan syari’ah, sosok kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang Shiddiq, Amanah, Fathonah, dan Tabligh harus terimlementasikan dalam manajemen perusahaan dalam memberikan keadilan kepada tenaga kerja. Dengan hadirnya buku ini di tangan pembaca, akan memberikan pemikiran baru dalam memenej sebuah perusahaan sehingga terjalin keadilan distributif.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan buku ini. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran kepada khalayak pembaca untuk kesempurnaan buku ini

Makassar, Maret 2017

DAFTAR ISI

Sampul Dalam	i
Balik Sampul Dalam.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Bab I Pendahuluan	1
Bab 2 Kepemimpinan Islami	6
2.1. Kepemimpinan Para Nabi	11
2.1.1. Shiddiq	11
2.1.2. Amanah	13
2.1.3. Fathonah	15
2.1.4. Tabligh.....	17
2.2. Sifat Kepemimpinan Islami	19
2.2.1. Adil	19
2.2.2. Istiqamah.....	21
2.2.3. Terbuka	21
2.2.4. Visioner	22
Bab 3 Keadilan Distributif.....	23
3.1. Tinjauan Konvensional	23
3.2. Adil dalam Tinjauan Islam	25
3.3. Penekanan Keadilan Distributif dalam Islam	37
Bab 4 Upah dan dan Tenaga Perspektif Syariah Islam	42
Bab 5 Kesejahteraan Karyawan	54
5.1. Ad-Din	61
5.2. An-Nafs	62
5.3. Al-Aql.....	63
5.4. Al-Maal	64
5.5. An-Nasl	65

Bab 6 Implementasi Kepemimpinan Islam dalam Keadilan dan Kesejahteraan	67
6.1. Kepemimpinan Islam dan Keadilan Distributif	67
6.2. Tinjauan Kepemimpinan Islam dan Keadilan Distributif dalam Al-Quran dan As-Sunnah ..	83
6.3. Kepemimpinan Islami terhadap Kesejahteraan	81
a. Salimul Aqidah.....	84
b. Shahihul Ibadah.....	86
c. Matinul Khuluq.....	87
d. Qadirun 'alal Kasbi.....	87
e. Mutsaqaful Fikri	88
f. Qowiyul Jismi.....	89
g. Mujahidun Linafsihi	89
h. Munazhamun fi syu'unihii	90
i. Nafi'un Lighairihi	90
6.4. Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja terhadap Keadilan Distributif.....	94
a. Tujuan Dakwah.....	96
b. Tujuan Pendidikan.....	97
c. Tujuan Sosial.....	98
d. Tujuan Ekonomi.....	99
Bab 7 Penutup	102
Daftar Pustaka	105
Indeks	108

BAB 1

PENDAHULUAN

Allah memerintahkan manusia untuk berlaku adil pada setiap orang, seperti dalam firman-Nya :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ ۙ لِلّٰهِ شُهَدَآءٌ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلّٰٓءَ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ
اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٥﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah (5) : 8)

Perlakuan yang adil sebagaimana yang menjadi *concern* dari Al-Qur'an dan hadist seperti yang diuraikan di atas jika diterapkan dalam lingkungan perusahaan serta merta akan memperbaiki tingkat kesejahteraan karyawan. Sebagaimana ditekankan dalam al-Qur'an surah an-Nisa (4) : 9, Allah swt berfirman :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا

اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.(QS.An-Nisa (4) : 9)

Ayat ini menegaskan kepada kaum muslim untuk bertanggung jawab terhadap anak keturunan yang ditinggalkan dalam keadaan lemah dari segi : jasmani, rohani (aqidah) dan ekonomi. Sikap kekhawatiran akan meninggalkan keturunan yang lemah berimplikasi pada rasa tanggung jawab seorang muslim untuk selalu berikhtiar terus untuk memberi penghidupan yang layak kepada keluarga dengan selalu berpedoman untuk mencari rezki yang halal dan thoyib, dan hanya dengan jalan takwa kepada Allah swt maka pintu rezki akan diberikan oleh Allah SWT.

Kesejahteraan didasarkan atas konsep-konsep Islam tentang kebahagiaan manusia (falah) dan kehidupan yang baik yang sangat menekankan aspek persaudaraan, keadilan sosio ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spiritual umat manusia. Hal ini disebabkan karena umat manusia memiliki kedudukan yang sama sebagai Khalifah Allah di muka bumi dan sekaligus sebagai hamba-Nya yang tidak akan dapat merasakan kebahagiaan

dan ketenangan batin kecuali jika kebahagiaan sejati telah dicapai melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan material dan spiritual.

Kesejahteraan dalam Islam menurut Saad Ibrahim (2007), adalah tercukupi kebutuhan material dan spiritual, yang berkelanjutan pada keselamatan di akhirat, dengan indikasi terpenuhi secara halal lagi thayyib : 1) Pangan, 2) Sandang, 3) Papan, 4) kesehatan, 5) Pendidikan, 6) Pekerjaan, 7) Keamanan, 8) Aktualisasi diri, 9) Keberagamaan. Kriteria kesejahteraan akan bekerja dalam kondisi untuk memilih dan mengalokasikan sumberdaya dengan dasar syariah secara Islam. Kriteria kesejahteraan tersebut, antara lain peningkatan ideologi, efisien penggunaan sumberdaya, keadilan dalam distribusi pendapatan, baik secara kolektif, prioritas terhadap kebutuhan yang mendesak, stabilitas, kepastian, keberlangsungan, produktivitas, pertimbangan manusia, universal, etika dan moral (Choudhury, 1991). Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan utama kemaslahatan syariah adalah mendorong kesejahteraan manusia, yang bertujuan untuk perlindungan terhadap agama (ad-Din), diri (an-Nafs), akal (al-Aql), keturunan (an-Nasl), dan harta (al-Maal). Ada dua pendekatan untuk mengukur kesejahteraan tersebut, yaitu pendekatan pengukuran secara obyektif dan pendekatan pengukuran secara subyektif (Chapra, 2000:101).

Beberapa ahli ekonomi telah mengubah data pada persepsi kesejahteraan itu sendiri sebagai sumber informasi tambahan untuk melakukan identifikasi. Pendekatan Zadjuli (2007), yang memperkenalkan garis kemiskinan dan

kemakmuran menurut Islam. Karakter ilmu dan harta serta sumber rizki dan flatah manusia dalam pengambilan keputusan tersebut yang disusun dalam *A Normative Macro Model* secara *Holistic*. Menurut Zadjuli (2007), manusia akan menjadi berdaya apabila manusia itu beriman dan berilmu. Allah telah menjanjikan bagi orang yang beriman dan berilmu serta mempraktekan keimanan dan keilmuannya tersebut untuk diri sendiri, keluarga, tetangga, maupun orang yang lain maka manusia tersebut oleh Allah SWT akan diangkat posisi/kedudukannya sederajat lebih tinggi bila dibandingkan dengan orang yang beriman dengan ilmu yang lebih sedikit.

Fenomena di perusahaan-perusahaan berbasis islami dan di perguruan tinggi Islam, bahwa pimpinan belum menerapkan syariah Islam secara kaffah dalam hal pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja (APB), baik dari aspek sumber pendapatan maupun dalam hal distribusi pendapatan. Dalam hal pendapatan pimpinan perusahaan masih bertumpu pada sumber pembayaran mahasiswa, belum banyak inovasi yang dilakukan untuk mendapatkan sumber dana selain dari pembayaran mahasiswa seperti mengelola unit bisnis, hibah di dalam dan luar negeri. Dalam hal distribusi pendapatan masih lebih banyak disalurkan untuk pembangunan infrastruktur dan sedikit yang dialokasikan untuk peningkatan kesejahteraan karyawan. Hal ini tercermin dalam pemberian gaji yang masih dibawah standar pendapatan rata-rata masyarakat bagi para karyawan, model pemberian imbalan berbasis kinerja, belum menjadi gambaran menyeluruh. Dengan belum diterapkannya syariat Islam secara kaffah

dan gaji karyawan yang masih rendah sehingga karyawan belum merasakan keadilan dalam diri kehidupannya, maka kebahagiaan/kesejahteraan karyawan dalam hal materil / harta masih jauh dari harapan yang diinginkan. Demikian juga dengan penempatan karyawan belum didasarkan pada penempatan karyawan sesuai bidang keahliannya, tetapi masih bertumpu pada unsur kedekatan dengan pimpinan padahal dalam Islam seperti yang disampaikan Sayyidina Ali *alaihissalam* bahwa “memberi pekerjaan kepada seseorang yang bukan ahlinya tunggulah kehancurannya”.

Pembahasan dalam buku ini akan difokuskan pada permasalahan berikut:

1. penerapan kepemimpinan Islami pengaruhnya terhadap pengelolaan anggaran dan keadilan distributif.
2. penerapan kepemimpinan Islami pengaruhnya terhadap kesejahteraan karyawan.

Dalam studi ini diharapkan memperoleh manfaat sebagai berikut :

- 1) Bagi para akademisi dapat digunakan sebagai masukan pengembangan keilmuan dalam bidang ilmu manajemen sumber daya manusia khususnya berkaitan dengan kepemimpinan Islami
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk kebijakan dalam peningkatan kesejahteraan karyawan diperusahaan-perusahaan dan Perguruan Tinggi Islam.

BAB 2

KEPEMIMPINAN ISLAMI

Dalam pandangan Islam, kepemimpinan berarti merupakan kegiatan menuntun, membimbing, memandu untuk menunjukkan jalan yang diridhai Allah SWT. Kegiatan itu bermaksud untuk menumbuhkembangkan kemampuan mengerjakan sendiri di lingkungan orang-orang yang dipimpin, dalam usahanya mencapai ridha Allah SWT selama kehidupannya di dunia dan akhirat kelak. Sehubungan dengan hal tersebut, Allah SWT berfirman :

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِّنْ غَلِيٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ
الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَن هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ
رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكَمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٤٣﴾

Artinya : Dan kami cabut segala macam dendam yang berada di dalam dada mereka; mengalir di bawah mereka sungai-sungai dan mereka berkata: "Segala puji bagi Allah yang Telah menunjuki kami kepada (surga) ini. dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Sesungguhnya Telah datang rasul-rasul Tuhan kami, membawa kebenaran." dan diserukan kepada mereka: "Itulah surga yang diwariskan kepadamu, disebabkan apa yang dahulu kamu kerjakan." (Q.S. Al-A'raaf ayat 43)

Dengan kata lain, kepemimpinan adalah kemampuan

mewujudkan semua kehendak Allah SWT yang telah diberitahukan-Nya melalui Rasulnya. Demikian juga difirmankan Allah SWT di ayat lain :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS : An-Nisaa (4) : 59.)*

Di sisi lain ada berbagai pengertian yang berbeda tentang kepemimpinan yang dikemukakan oleh Terry (1960) mengatakan bahwa kepemimpinan (*leadership*) adalah merupakan hubungan antara seseorang dengan orang lain , pemimpin mampu memengaruhi orang lain agar bersedia bekerja bersama-sama dalam tugas yang berkaitan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Koontz, & O'Donnell (1986), mendefinisikan kepemimpinan sebagai seni membujuk bawahan agar mau mengerjakan tugas-tugas dengan yakin dan semangat. Robbin (2000), berpendapat bahwa pemimpin terkait dengan kemampuan memengaruhi kelompok untuk mencapai tujuan. Fiedler mengatakan bahwa kepemimpinan adalah pola hubungan antara individu yang menggunakan wewenang dan

pengaruh terhadap orang lain atau sekelompok orang agar terbentuk kerja sama untuk menyelesaikan suatu tugas. Sedangkan Yulk (1994) mendefinisikan kepemimpinan merupakan proses pengaruh social dan pengaruh sengaja dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain untuk menstruktur aktifitas-aktifitas dan relasi-relasi di dalam sebuah organisasi. Perbedaan definisi tersebut terletak pada siapa yang menggunakan pengaruh, cara menggunakan pengaruh dan sasaran yang ingin dicapai pengaruh dan hasil usaha menggunakan pengaruh.

Dalam Islam secara proporsional kepemimpinan itu dimaknai sebagai suatu karakter yang akan membawa masyarakat sampai pada tujuan yang telah disepakati, yang dapat mengartikulasikan dan mengharmonisasikan sebagai kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Kepemimpinan dalam Islam pada dasarnya adalah prinsip kepercayaan. Seringkali merupakan sebuah kontrak social (secara eksplisit) antara pemimpin dan yang dipimpin. Sebuah kontrak yang mengisyaratkan integritas dan keadilan, sesuai dengan Firman Allah dalam Surat Al-Maaidah ayat 42 :

سَمْعُونََ لِّلْكَذِبِ أَكْثَرُونَ لِّلشَّحْتِ ۚ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ
 أَعْرَضْ عَنْهُمْ ۗ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۗ وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم
 بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya : Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram [418]. jika mereka (orang Yahudi)

datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Dalam Islam, kepemimpinan bukanlah milik segolongan elit. Tapi menjadi suatu kewajiban bagi setiap muslim. Rasulullah bersabda : “Setiap dari kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya”. (H.R. Muslim).

Menurut persepektif Islam, ada dua peran yang dimainkan oleh seorang pemimpin yaitu :

1. Pelayan, pemimpin adalah pelayan bagi pengikutnya, maka ia wajib memberikan kesejahteraan bagi pengikutnya.
2. Pemandu, pemimpin adalah yang memberikan arahan pada pengikutnya untuk menunjukkan jalan yang terbaik bagi pengikutnya agar selamat sampai tujuan.

Menurut Beekun dan Badawi (1999), dalam “*The Leadership Process in Islam*” dalam melakukan fungsinya sebagai pemimpin atau pengikut, seorang muslim akan melewati empat tahapan proses dalam pembangunan spiritualnya. Keempat tahapan itu akan memengaruhi perilaku pemimpin, yakni :

1. Iman, Iman mengejawantahkan pada kepercayaan kepada ke-esa-an Allah dan kenabian Muhammad SAW.
2. Islam, Islam berarti pencapaian kedamaian bersama Allah. Al-Maududi dalam bukunya "*Gerakan Islam ; Dinamika nilai, kekuasaan dan perubahan*".
3. Taqwa, seorang yang tunduk kepada memiliki kesadaran dalam hatinya untuk selalu melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Al-Maududi mengatakan bahwa esensinya taqwa terletak di dalam hati dan pikiran
4. Ikhsan, taqwa adalah takut kepada Allah, dan selalu merasakan kehadiran-Nya. Sementara Ikhsan adalah kecintaan kepada Allah. Kecintaan ini memotivasi seseorang untuk berbuat hanya pada tindakan yang diridhai Allah SWT.

Menurut Hughes, et.al (1999) ada tiga faktor yang berinteraksi menentukan efektifitas kepemimpinan yaitu :

1. *Leader behavior* (perilaku pemimpin), efektifitas kepemimpinan sangat dipengaruhi oleh gaya memimpin seseorang, dalam teori kepemimpinan ada beberapa gaya kepemimpinan yang sering digunakan seperti; direktif, suportif, demokratik dan lainnya. Karakteristik pemimpin seperti ; perilaku, kepribadian, pengalaman dan kemampuan komunikasi sangat berpengaruh terhadap gaya seseorang memimpin organisasi. Perbedaan gaya dan perilaku kepemimpinan sangat menentukan tingkat keberhasilan dalam penerimaan. Tingkat kepuasan dan tingkat komitmen bawahan. Pemilihan gaya yang

tepat disertai motivasi eksternal dapat mengarahkan pencapaian tujuan seseorang maupun organisasi.

2. *Subordinate* (Bawahan), efektifitas kepemimpinan juga dipengaruhi oleh tingkat penerimaan dan dukungan bawahan. Bawahan akan mendukung seorang pemimpin sepanjang mereka melihat tindakan pemimpin dianggap dapat memberi manfaat dan meningkatkan kepuasan mereka.
3. *Situation* (Situasi). Menurut Fiedler ada tiga dimensi situasi dalam gaya kepemimpinan yaitu : hubungan pemimpin anggota, tingkat dalam struktur tugas, dan posisi kekuasaan pemimpin yang didapat melalui wewenang formal. Situasi dan kondisi tersebut menentukan efektifitas suatu kepemimpinan dalam organisasi.

Dalam menyempurnakan karakter seorang pemimpin maka dalam Islam perlu memiliki empat sifat utama yang dimiliki para rasul yang mampu menjadi landasan bagi terbangunnya karakter pemimpin Islam yang baik.

2.1. Kepemimpinan Para Nabi

2.1.1. Shiddiq

Kata shadiq (orang jujur) berasal dari kata shiddiq (kejujuran), kata shiddiq adalah bentuk penekanan (mubalaghah) dari shadiq, yang berarti orang yang didominasi oleh kejujuran. Menjunjung tinggi kejujuran di atas segalanya adalah prinsip hidup Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda : “Jika seorang hamba tetap bertindak jujur dan berteguh hati untuk bertindak jujur, maka

ia akan ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur, dan jika ia tetap berbuat dusta dan berteguh hati untuk berbuat dusta, maka ia akan ditulis di sisi Allah sebagai pendusta.”

Dalam HR. Abu Dawud dan Tirmidzi, ada contoh kisah bagaimana Rasul menegakkan kejujuran. Suatu saat terjadi hubungan dagang dengan seorang yahudi, dimana beliau dipesan untuk menjualkan seekor unta miliknya dengan harga jual yang ditentukan. Yahudi itu menaruh hormat kepada Beliau karena walaupun hasil penjualan unta itu melampaui harga sebenarnya, tapi Beliau tetap melaporkan hasil penjualan seluruhnya.

Kejujuran adalah permata yang tidak ternilai harganya. Kejujuran merupakan mata uang yang laku dimanapun diperdagangkan. Jangankan orang-orang yang baik. Orang yang paling tidak baik sekalipun pasti berharap dirinya diperlakukan secara jujur. Bahkan orang-orang yang biasa tidak jujur, andai suruh memilih karyawan di tempat kerjanya, pasti berharap mendapatkan karyawan yang jujur.

Seorang ciri pemimpin muslim yang teguh keimanannya, menjadikan kejujuran (shidiq) sebagai landasan untuk mencapai kesuksesan. Dia selalu memperhatikan etika profesi dan moral serta rambu-rambu agama, sehingga halalan thoyyiban menjadi proses perjalanannya meniti karir meraih sukses. Jujur lisannya, jujur rasa hatinya dan jujur gerakannya. Itulah sosok pemimpin Islam yang profesional dalam genggamannya kasih sayang Allah. Firman-Nya di dalam QS At-Taubah ayat 119 sebagai berikut :

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah, dan ikuti langkah orang-orang yang jujur.” [QS. At Taubah : 119].

2.1.2. Amanah

Amanah atau dapat dipercaya. Inilah sifat kedua yang semestinya menjadi landasan terbangunnya karakter profesional seorang muslim. Tidak terbilang banyaknya tuntunan tentang keamanahan, baik dalam al Qur’an maupun hadits Nabi. Sebagiannya berikut ini:

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS : Al Anfaal : 27).

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَنْقُومِرِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢١٣﴾

Artinya : Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. (QS : Al Mu’minun (23).

Sementara itu, dalam hadits Rasulullah SAW, banyak dijelaskan mengenai istilah amanat sebagai berikut :

- "Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberimu amanat dan janganlah berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu." (Riwayat Tirmidzi dan Abu Dawud.)
- "Barangsiapa ingin disenangi Allah dan Rasul-Nya hendaklah berbicara jujur, menunaikan amanah dan tidak mengganggu tetangganya." (HR. Al-Baihaqi). Untuk menjadi orang yang amanah, diperlukan landasan iman yang kokoh serta memperbanyak amal sholih. Tidak bisa sifat amanah ditegakkan hanya dengan mengandalkan integritas pribadi semata. Sekuat-kuatnya integritas pribadi, pada saatnya ada masa dimana integritas itu menurun. Saat itulah hati dan pikiran jadi tergoda untuk mencederai amanah.
- Ketahuilah oleh kita semua, bahwa sifat amanah itu anugerah dari-Nya. Kita bisa membaca hadits berikut ini;" Rasulullah SAW. menceritakan kepada kami dua hadits. Yang satu aku sudah tahu dan aku masih menunggu yang satu lagi. Beliau menceritakan kepada kami bahwa amanat berada di pangkal hati manusia. Kemudian Alquran turun dan mereka tahu dari Alquran dan dari hadits. Kemudian beliau menceritakan kepada kami tentang hilangnya amanat, beliau bersabda: Seseorang tidur dengan nyenyak, lalu dicabutnya amanat dari dalam hatinya, maka tampak tinggal bekasnya seperti bercak. Kemudian ia tidur lagi, dan dicabutnya amanat tersebut dari hatinya, maka tinggallah bekasnya seperti tempat kosong, seperti batu yang jatuh di atas kakimu, bekas tatapan batu itu terus membengkak sedang di dalamnya kosong dan Nabi mengambil batu kecil lalu menjatuhkannya di atas kaki beliau. Kemudian beliau melanjutkan: Orang-orang

saling berbaiat, tapi mereka tidak menjalankan amanat, sehingga dikatakan bahwa di antara bani fulan ada seorang yang jujur dan kepadanya dikatakan: Alangkah tabahnya orang ini, alangkah jujurnya ia, alangkah pandainya ia. Sedangkan di hatinya tidak ada iman meski sebesar biji sawi. Ternyata telah datang suatu zaman, di mana aku sudah tidak peduli siapa yang berbaiat kepadaku, kalau ia seorang Muslim maka agamanya akan melarangnya berkhianat dan jika ia seorang Kristen atau Yahudi niscaya para pemimpinnya akan melarang mereka berkhianat kepadaku, adapun hari ini aku tidak akan membaiat kalian kecuali si fulan dan si fulan. (Shahih Muslim No.206).

Setelah membaca hadits di atas, jelaslah bahwa amanah itu pangkalnya di hati masing-masing. Seseorang bisa menjadi orang amanah atau tidak bergantung kepada kadar keimanan dan amal sholih yang lakukannya.

2.1.3. Fathonah

Secara harfiah Fathonah diartikan dengan pintar tapi jika ditelaah lebih jauh Fathonah ini lebih identik dengan kepintaran, kecerdikan dan kearifan sekaligus. Jadi bukan sekedar pintar tapi juga arif bijaksana. Memahami kecerdasan Nabi jelas bukan hanya cerdas secara intelektual (IQ), tapi juga cerdas secara emosional dan spiritual (ESQ). Sifat fathonah (kecerdasan) di dalam diri Rasulullah lebih dimatangkan oleh kecerdasan emosional dan spiritual. Sebuah kecerdasan yang memunculkan kearifan yang luar biasa.

Dalam perjalanan hidup beliau sebelum diangkat sebagai Rasul, terkenal kisah peletakan kembali batu hajar aswad ketempatnya semula setelah masa pemugaran selesai. Para kabilah berselisih pendapat dan masing-masing merasa paling berhak untuk mengangkat dan meletakkan ke tempatnya semula. Yang demikian bagi para kabilah merupakan tanda kehormatan yang luar biasa. Maka diputuskan bahwa siapa saja yang paling dahulu memasuki pelataran Ka'bah, dialah orang yang paling berhak untuk meletakkan batu hajar aswad. Ternyata Muhammad muda yang memperoleh hak itu. Apa yang dilakukan Beliau? Beliau merentangkan surbannya. Kemudian meletakkan batu hajar aswad di tengahnya. Setelah itu Beliau mempersilakan masing-masing ketua kabilah untuk memegang ujung surban Beliau untuk diangkat bersama-sama. Setelah itu Beliau meletakkan batu hajar aswad ditempatnya.

Kisah diatas merupakan contoh aplikasi sifat fathonah yang sangat luar biasa. Beliau memecahkan masalah dengan orientasi memuaskan semua. "Orientasi memuaskan semua" inilah salah satu catatan penting dari aplikasi sifat fathonah. Kalau orientasi memuaskan semua diaplikasikan dalam profesi apapun, dampaknya pasti luar biasa. Orang akan berfikir obyektif dalam pekerjaannya. Sebaliknya akan meminggirkan egoisme pribadi yang tidak proporsional.

Andai saja sifat fathonah menjadi karakter setiap pribadi muslim yang teraplikasikan dalam jenis profesi apapun, maka ummat Islam akan menjadi profesional

unggulan. Sayang umat Islam jauh dari kondisi ideal. Wajah umat Islam jauh dari gambaran ideal penerapan sifat fathonah.

2.1.4. Tabligh

Tabligh adalah tugas Rasulullah menyampaikan risalah-Nya., seperti yang tercantum di dalam Al-Qur'an Surah An-Najm (53) ayat 4 sebagai berikut :

إِنَّهُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

Artinya : Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). “

Bagi umat Islam tabligh bisa menjadi inspirasi dalam banyak makna yang bisa diaplikasikan dalam bisnis dan profesi. Bisa dimaknai mengkomunikasikan dengan baik dan intensif produk dan jasa yang ditawarkan. Komunikatif dalam menyampaikan apapun kepada siapapun. Memberikan layanan terbaik kepada siapapun. Bisa dimaknai semangat menciptakan kebaikan bersama. Orang tidak cukup berbuat baik untuk diri sendiri. Kebaikan harus juga dinikmati oleh sebanyak-banyaknya manusia yang lain. Dan silahkan diterjemahkan dalam konteks kebaikan yang lain.

Seorang professional muslim dengan akidahnya yang kuat tentu memegang teguh aturan Allah. Selalu berusaha merealisasikan sifat dan teladan Rasulullah. Sifat tabligh berusaha ia realisasikan dalam profesinya. Dari lisannya akan selalu keluar kata-kata yang baik dan terasa sejuk

didengar. Kalimatnya berisikan nasehat dan penghargaan pada setiap hasil pekerjaan orang lain. Berani mengatakan yang benar walaupun terasa pahit untuk diterima.

Dari geraknya tergambar kesholihan karena selalu menunjukkan identitasnya sebagai seorang muslim. Tugas pekerjaannya dilakukan penuh dedikasi dan loyalitas yang tinggi. Menjunjung tinggi kejujuran di atas segalanya dan pantang untuk berbohong atau berkhianat. Melaksanakan seluruh aktivitasnya dengan penuh keikhlasan dan cerdas dalam menanggulangi setiap persoalan tanpa ada yang harus merasa tersinggung atau sakit hati. Itulah sosok profesional muslim dengan akhlak yang mulia (akhlak al kariim) yang akan memberikan cahaya dan kesejukan di lingkungannya serta memberi dan menjadi contoh dengan akhlaknya itu, sehingga memberi nilai tabligh atau dakwah kepada lingkungannya dimanapun dia berada.

Rasulullah telah mewariskan sifat-sifat kepribadian yang tidak ternilai. Kewajiban manusia sebagai ummatnya untuk mengambil manfaat sebsar-besarnya dan seluas-luasnya untuk kebaikan selama hidup di muka bumi. Sayang, ummat Islam belum bisa menjadi ahli waris yang baik. Karakter fathonah, amanah, shiddiq dan tabligh belum tercermin sepenuhnya dalam keseharian. Baik sebagai pribadi maupun keummatan. Bahkan yang nampak wajah bopeng keummatan yang memiliukan. Bagaimana tidak, ummat Islam sebagai pewaris keamanan dan kejujuran, justru tercatat paling tidak amanah.

Setidaknya negeri yang bernama Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam justru termasuk

negeri terkorup sedunia. Sudah waktunya semua orang mengaca diri. Saatnya merebut kembali permata warisan Rasul. Untuk selanjutnya diaplikasikan dalam profesi sehingga membentuk karakter profesional yang sejati. Profesional yang tidak hanya mengakar di bumi. Tapi juga menjulang hingga kelangit tinggi. Tidak hanya baik dalam pandangan sesama. Tapi juga mendapatkan rahmat dan ridha-Nya.

2.2. Sifat Kepemimpinan Islam

2.2.1. Adil

Dalam pandangan Islam para penguasa atau pemimpin dapat dikatakan adil apabila mereka dapat menjaga standar hidupnya sesuai dengan standar hidup orang-orang yang berpenghasilan rendah. Taraf kehidupan seorang penguasa muslim harus sama dengan taraf hidup orang-orang yang paling rendah (miskin) yang hidup dalam wilayah kekuasaannya, agar terdapat suatu ikatan yang nyata antara si penguasa dengan orang-orang yang miskin itu.

Jika tidak mereka tidak akan mau menerima kepemimpinannya dan tidak akan memberikan dukungan sepenuh hatinya. Suatu perasaan jauh antara mereka dengan si pemimpin atau si penguasa akan menimbulkan rasa benci kepadanya. Ajaran yang mengandung prinsip yang sangat penting ini pernah disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib as kepada bawahannya ketika beliau menjadi Khalifah pada saat itu.

Allah menyukai para pemimpin keadilan untuk menjaga kehidupannya dalam batas-batas kehidupan orang-orang miskin agar rakyat tidak salah mengerti terhadapnya". Itulah sebabnya dalam Islam ditegaskan agar seorang penguasa atau pemimpin ummat Islam pertama-tama dia harus menjelaskan posisinya dan keluarganya dengan memperhatikan standar kehidupannya. Jika mereka berkeinginan memimpin orang-orang yang kaya dan miskin, maka mereka harus tampil dengan keadilan atau tidak sama sekali.

Seorang penulis Kristen, George Jordac menulis di dalam bukunya "Voice of Justice", katanya : "Jika Anda ingin menggerakkan air yang ada di dalam kolam kecil maka Anda dapat melakukannya cukup dengan menggerakkan tangan Anda, sehingga gelombang air akan bergerak saling bertabrakkan. Tetapi itu tidak dapat terjadi jika Anda lakukan di sebuah kolam renang. Kecuali jika Anda melemparkan sebuah batu besar ke dalam kolam renang tersebut. Akan tetapi hal itu berbeda jika air itu berupa danau yang besar, Anda tidak dapat membuat air menjadi bergelombang kecuali Anda melemparkan sebuah gunung ke dalamnya. Hal yang sama tidak dapat Anda lakukan pada sebuah lautan, kecuali jika Anda melemparkan sebuah planet ke dalam lautan tersebut. Tapi saya (George Jordac) mengetahui sebuah laut yang tidak dapat digerakkan sama sekali kecuali oleh satu hal, yaitu jeritan orang yang dizalimi.

2.2.2. Istiqamah

Istiqamah diterjemahkan sebagai bentuk kualitas batin yang melahirkan sikap konsisten (taat azas) dan teguh pendirian untuk menegakkan dan membentuk sesuatu menuju pada kondisi yang lebih baik. Seorang pemimpin yang istiqamah memiliki sikap menghargai waktu, disiplin, tanggung jawab, tidak menunda-nunda pekerjaan dan sabar dalam pencapaian tujuan kepemimpinan. Kepemimpinan Islam yang istiqamah adalah : **a)** selalu memberikan tauladan di lingkungan perguruan tinggi. Jika bercermin pada Rasulullah SAW., bahwa telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan maka seperti itu pula yang harus direpresentasikan oleh pimpinan perusahaan antara lain satunya kata dan perbuatan, menjaga kehormatannya dalam bertindak. Kepemimpinan Islam seharusnya memberikan keteladanan di saat organisasi dan perkembangan dunia yang krisis dengan keteladanan pimpinan. **b)** usahanya keras yang tanpa kenal lelah untuk dan tidak pernah berhenti berpikir dan berinovasi untuk memajukan perusahaan serta **c)** perilakunya selalu demokratis dalam mengambil keputusan dan melibatkan semua unsur yang ada dalam lingkungan perusahaan tanpa melihat status pekerjaan dan ekonomi/sosial.

2.2.3. Terbuka

Sikap terbuka yang dimiliki seorang pemimpin adalah terbuka terhadap lingkungan perubahan baik internal maupun eksternal. Lingkungan eksternal yang cepat berubah memang dituntut oleh setiap organisasi untuk cepat mengadaptasi organisasi yang dipimpinnya. Kepemimpinan terbuka juga menonjolkan kejelasan dalam

pengambilan keputusan, proses perencanaan yang memberikan kesempatan kepada semua anggota organisasi menyampaikan pendapatnya dan apabila pendapatan anggota organisasi tersebut ditolak akan dilengkapi dengan alasan penolakannya. Kepemimpinan yang terbuka akan membuat semua anggota organisasi merasa jelas, keberhasilan membawa *reward* dan kesalahan mendatangkan *punishment*.

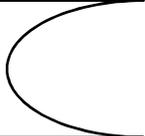
2.2.4. Visioner

Setiap orang mempunyai kapasitas untuk menjadi seorang pemimpin. Namun untuk menjadi seorang pemimpin, itu tidak mudah karena seorang pemimpin yang baik itu tidak dilahirkan tetapi dibentuk oleh proses demi proses, melalui tahapan dan ujian tertentu. Kepemimpinan yang baik harus selalu belajar dan bertumbuh untuk mencapai makna kehidupan pribadi dan untuk mencapai misi dan tujuan organisasi. Karakter sejati seorang pemimpin yaitu dia harus mempunyai visi yang jelas dan dibagikan kepada para karyawannya. Salah satu tugas seorang pemimpin adalah mewujudkan visi bersama menjadi sebuah rencana aksi dengan membangun, merencanakan, serta menetapkan sasaran yang jelas bagi timnya. Sasaran tersebut harus terukur baik dari dimensi kuantitatif, kualitatif maupun dari dimensi waktu. Menjadi seorang pemimpin sejati apabila seseorang telah menemukan visi dan misi hidup terjadi kedamaian dalam diri dan membentuk karakter yang kokoh, setiap ucapan dan tindakannya mulai memberi pengaruh kepada lingkungan dan keberadaannya mendorong perubahan dalam organisasi.



**BAB
3**

**Keadilan
Distributif**



3.1 Tinjauan Konvensional

Distribusi sangat erat kaitannya dengan hak-hak individu dalam suatu masyarakat. Distribusi pendapatan merupakan bagian penting dalam membentuk kesejahteraan suatu komunitas. Kesenjangan distribusi pendapatan akan berdampak pada aspek ekonomi dan sosial-politik. Oleh karena itu, tema distribusi menjadi kajian sentral dalam filosofi ekonomi Islami. Secara umum asas kebijakan ekonomi dalam Islam adalah menyangkut distribusi kekayaan. Distribusi kekayaan harus dilihat sebagai bagian dari pilihan pribadi, bagian dari keputusan ekonomi mikro seseorang, bukan peningkatan kekayaan sebagaimana yang ditempuh oleh ekonomi konvensional. (Zaki, 2009).

Prinsip pokok ekonomi konvensional adalah efisiensi. Prinsip ini muncul secara langsung, dari definisinya berkenaan dengan problema ekonomi. Jika keinginan adalah tidak terbatas dan sumberdaya-sumberdaya terbatas, maka pemecahannya adalah dengan bertindak "ekonomis" Inilah yang disebut dengan efisiensi, yaitu: "mengerjakan sesuatu yang terbaik dengan apa yang dimiliki" Jika keinginan manusia adalah sangat tak terbatas dan sumberdayanya adalah langka, manusia tidak dapat memenuhi kepuasan masyarakat. Di dalam kerangka konvensional, konsep efisiensi diartikan

memaksimalkan kepuasan dengan bersumber yang memadai, akan tetapi makna efisiensi dalam kerangka Islam adalah memaksimalkan pemenuhan kebutuhan dengan sumber-sumber yang memadai. Dua konsep ini adalah berbeda. Struktur masyarakat "yang baik" tidak hanya ditentukan oleh "efisiensi" dalam alokasi barang-barang modal, tetapi juga "perhatian yang fair" dalam distribusi barang kapital secara adil. Dalam hal ini kapitalisme telah gagal menjawab pertanyaan "apa" dan "bagaimana" memproduksi dengan cara mendistribusikan sumberdaya produktif secara adil, (Zaki, 2009).

Selanjutnya Zaki (2009) menjelaskan, bahwa distribusi kekayaan merupakan masalah yang sangat penting, sulit, dan rumit. Penyelesaiannya secara adil akan mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh komponen masyarakat. Berlimpahnya kekayaan nasional tidak akan bermanfaat bagi penduduk bila terjadi distribusi yang zalim, dimana kemakmuran tidak pernah dinikmati masyarakat luas. Prinsip distribusi yang menjadi pedoman dalam sistem ekonomi Islam adalah memperbanyak produksi (*output*), dan distribusi kekayaan agar sirkulasi kekayaan meningkat dan memungkinkan membawa pembagian yang adil di antara berbagai komponen masyarakat, serta tidak memusatkan modal pada sebagian kecil kelompok tertentu. Kekayaan itu haruslah didistribusikan ke seluruh komponen masyarakat untuk pemberdayaan ekonomi umat, dan kekayaan itu tidak boleh menjadi suatu komoditi yang beredar secara terbatas di antara orang-orang kaya saja.

Teori distribusi diharapkan dapat mengatasi masalah distribusi pendapatan antara berbagai kelas dalam

masyarakat. Mannan (1997:16) menyebutkan, bahwa teori ekonomi modern tentang distribusi merupakan suatu teori yang menetapkan harga jasa produksi. Ia juga menjelaskan nilai jasa dari berbagai faktor-faktor produksi dan nilai-nilai etik tentang pemilikan faktor-faktor produksi. Disamping itu Zarqa dalam Rahardjo (2002 :165) mengatakan, ada beberapa faktor yang menjadi dasar redistribusi, yaitu tukar menukar (*change*), Kebutuhan (*need*), kekuasaan (*power*), sistem sosial dan nilai etika (*social system and ethical values*). Sejalan dengan prinsip pertukaran (*exchange*) antara lain seseorang memperoleh pendapatan yang wajar dan adil sesuai dengan kinerja dan kontribusi yang diberikan. Distribusi didasarkan atas kebutuhan seseorang memperoleh upah karena pekerjaannya dibutuhkan oleh pihak lain. Satu pihak membutuhkan materi untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan pihak lain membutuhkan tenaga kerja sebagai faktor produksi. Kekuasaan (*power*) juga berperan penting, di mana seseorang yang memiliki kekuasaan atau otoritas cenderung mendapatkan lebih banyak karena ada kemudahan akses.

3.2. Adil dalam Tinjauan Islam

Keadilan merupakan pilar terpenting dalam ekonomi Islam. Penegakkan keadilan telah ditekankan oleh Al-Qur'an sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah (QS.57:25), termasuk penegakkan keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيُقُومَ
 النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۗ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ
 اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢٥﴾

Artinya : 25. Sesungguhnya kami Telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.

Allah yang menurunkan Islam sebagai sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia, menekankan pentingnya penegakan keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi, politik maupun sosial. Komitmen Al-Quran tentang penegakan keadilan sangat jelas. Hal itu terlihat dari penyebutan kata keadilan di dalam Al-quran mencapai lebih dari seribu kali, yang berarti ; kata urutan ketiga yang banyak disebut Al-Quran setelah kata Allah dan 'ilm.

Bahkan, Ali Syariati dalam Khadduri (1984) menyebutkan, dua pertiga ayat-ayat Al-Quran berisi tentang keharusan menegakkan keadilan dan membenci kezhaliman, dengan ungkapan kata *zhulm, itsm, dhalal*, dll. Karena itu, tujuan keadilan sosio ekonomi dan pemerataan

pendapatan / kesejahteraan, dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari filsafat moral Islam.

Keadilan merupakan kejujuran, kelurusan, keikhlasan yang tidak berat sebelah. Menurut Khaldun (2000), pembangunan tidak dapat dicapai kecuali dengan keadilan dan keadilan merupakan tolok ukur yang dipakai Allah untuk mengevaluasi manusia. Abu Yusuf menjelaskan keadilan kepada khalifah Harun Ar-Rasyid seraya mengatakan "Mengantarkan keadilan kepada mereka yang disakiti dan menghapus kezaliman akan meningkatkan penghasilan, mempercepat pembangunan negara, dan membawa keberkahan, disamping mendapatkan pahala di akhirat". Para pemimpin yang sukses sangat serius dalam mewujudkan keadilan. Mereka akan mengatakan sesuatu dan berusaha untuk melaksanakannya. Mereka melaksanakan dengan menggunakan prinsip keadilan, tidak pandang bulu.

Sesungguhnya setiap orang ingin diperlakukan secara adil, tetapi banyak diantara manusia yang mengabaikan prinsip keadilan ini. Apalagi ketika dalam pengambilan keputusan, orang mendapatkan tekanan yang membuatnya tidak berlaku adil. Pemimpin yang sukses, mempunyai kemampuan untuk tetap berlaku adil, meskipun mendapat tekanan. Bersikap adil memang sangat sulit, tidak semua di antara manusia mampu melaksanakan di perusahaan ataupun organisasi.

Begitulah, penekanan Islam pada penegakkan keadilan sosio ekonomi. Maka, adalah keliru, klaim kapitalis maupun sosialis yang menyatakan, "Hanya ideologi kami

yang berbicara dan bertindak tegas dalam masalah keadilan. “Setidaknya hanya kamilah yang mempunyai komitmen kuat tentang nilai-nilai keadilan”. Itulah klaim yang dilontarkan berbagai komponen masyarakat dunia dalam kerangka memperlihatkan keunggulan ideologi atau kepercayaan yang mereka anut.

Harus dibedakan bahwa konsep kapitalis tentang keadilan sosio ekonomi dan pemerataan pendapatan, tidak didasarkan pada komitmen spiritual dan persaudaraan (ukhuwah) sesama manusia. Komitmen penegakkan keadilan sosio ekonomi lebih merupakan akibat dari tekanan kelompok. Karenanya, sistem kapitalisme terutama yang berkaitan dengan uang dan perbankan, tidak dimaksudkan untuk mencapai tujuan – tujuan keadilan sosio ekonomi yang berdasarkan nilai transendental (spritual) dan persaudaraan universal. Sehingga, tidak aneh, apabila uang masyarakat yang ditarik oleh bank konvensional (kapitalis) dominan hanya digunakan oleh para pengusaha besar (konglomerat). Lembaga perbankan tidak dinikmati oleh rakyat kecil yang menjadi mayoritas penduduk sebuah negara. Fenomena ini semakin jelas terjadi di Indonesia. Akibatnya yang kaya semakin kaya dan miskin makin miskin. Ketidakadilan pun semakin lebar.

Sebagaimana disebut di atas, konversi ekonomi Barat (terutama kapitalisme) kepada penegakan keadilan sosio ekonomi, merupakan akibat tekanan-tekanan kelompok masyarakat dan tekanan-tekanan politik. Untuk mewujudkan keadilan sosio-ekonomi itu mereka mengambil beberapa langkah, terutama melalui pajak dan transfer payment.

Jadi, konsep keadilan sosio ekonomi dalam Islam berbeda secara mendasar dengan konsep keadilan dalam kapitalisme dan sosialisme. Keadilan sosio ekonomi dalam Islam, selain didasarkan pada komitmen spritual, juga didasarkan atas konsep persaudaraan universal sesama manusia.

Al-Quran secara eksplisit menekankan pentingnya keadilan dan persaudaraan tersebut. Menurut Chapra (2000), sebuah masyarakat Islam yang ideal mesti mengaktualisasikan keduanya secara bersamaan, karena keduanya merupakan dua sisi yang sama yang tak bisa dipisahkan. Dengan demikian, kedua tujuan ini terintegrasi sangat kuat ke dalam ajaran Islam sehingga realisasinya menjadi komitmen spritual (ibadah) bagi masyarakat Islam.

Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan, menuntut agar semua sumber daya yang menjadi amanat suci Tuhan, digunakan untuk mewujudkan maqashid syari'ah, yakni pemenuhan kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan dasar (primer), seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Persaudaraan dan keadilan juga menuntut agar sumberdaya didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat melalui kebijakan yang adil dan instrumen zakat, infaq, sedekah, pajak, kharaj, jizyah, cukai ekspor-impor dan sebagainya.

Tauhid yang menjadi fondasi utama ekonomi Islam, mempunyai hubungan kuat dengan konsep keadilan sosio-ekonomi dan persaudaraan. Ekonomi Tauhid yang mengajarkan bahwa Allah sebagai pemilik mutlak dan

manusia hanyalah sebagai pemegang amanah, mempunyai konsekuensi, bahwa di dalam harta yang dimiliki setiap individu terdapat hak-hak orang lain yang harus dikeluarkan sesuai dengan perintah Allah, berupa zakat, infaq dan sedekah dan cara-cara lain guna melaksanakan pendistribusian pendapatan yang sesuai dengan konsep persaudaraan umat manusia.

Sistem keuangan dan perbankan serta kebijakan moneter, misalnya, dirancang semuanya secara organis dan terkait satu sama lain untuk memberikan sumbangan yang positif bagi pengurangan ketidak-adilan dalam ekonomi dalam bentuk pengucuran pembiayaan (kredit) bagi masyarakat dan memberikan pinjaman lunak bagi masyarakat ekonomi lemah melalui produk qardhul hasan.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan cita-cita keadilan sosial ekonomi, Islam secara tegas mengancam konsentrasi asset kekayaan pada sekelompok tertentu dan menawarkan konsep zakat, infaq, sedeqah, waqaf dan institusi lainnya, seperti pajak, jizyah, dharibah, dan sebagainya.

Al-Quran dengan tegas mengatakan,

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا^ع وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٥٦﴾

*Artinya : 7. Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, **supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu.** apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ

Artinya : Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, (QS. Al-Maarij (70) : 24)

Berdasarkan prinsip ini, maka konsep pertumbuhan ekonomi dalam Islam berbeda dengan konsep pertumbuhan ekonomi kapitalisme yang selalu menggunakan indikator PDB (Produk Domestik Bruto) dan perkapita. Dalam Islam, pertumbuhan harus seiring dengan pemerataan. Tujuan kegiatan ekonomi, bukanlah meningkatkan pertumbuhan sebagaimana dalam konsep ekonomi kapitalisme. Tujuan ekonomi Islam lebih memprioritaskan pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.

Karena itu, Islam menekankan keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan. Pertumbuhan bukan menjadi tujuan utama, kecuali dibarengi dengan pemerataan. Dalam konsep Islam, pertumbuhan dan pemerataan merupakan dua sisi dari sebuah entitas yang tak terpisahkan, karena itu

keduanya tak boleh dipisahkan.

Berdasarkan prinsip ini, maka paradigma *trickle down effect*, yang dikembangkan kapitalisme dan pernah diterapkan di Indonesia selama rezim orde baru, bertentangan dengan konsep keadilan ekonomi menurut Islam.

Selanjutnya, sistem ekonomi kapitalis dicirikan oleh menonjolnya peran perusahaan swasta (*private ownership*) dengan motivasi mencari keuntungan maksimum, harga pasar akan mengatur alokasi sumberdaya, dan efisiensi. Namun sistem ini selalu gagal dalam membuat pertumbuhan dan pemerataan berjalan dengan seiring.

Sistem ekonomi kapitalis telah menggoyahkan fondasi moral manusia, karena sistem ini telah menghasilkan manusia yang tamak, boros dan angkuh. Sistem kapitalis juga telah melahirkan sejumlah bankir hebat, beberapa industriawan yang kaya raya, sejumlah pengusaha yang sukses. Namun di pihak lain, telah muncul banyak konsumen yang tidak mampu memenuhi kebutuhan minimumnya. Kesenjangan terjadi secara tajam. Perusahaan-perusahaan yang lemah akan tersingkir dan tersungkur.

Perlu ditegaskan, bahwa melekatnya hak orang lain pada harta seseorang (QS. 70:24), bukanlah dimaksudkan untuk mematahkan semangat karya pada setiap individu atau menimbulkan rasa malas bagi sebagian orang. Juga tidak dimaksudkan untuk menciptakan kerataan pemilikan kekayaan secara kaku. Dalam perspektif ekonomi Islam,

proporsi pemerataan yang betul-betul sama rata, sebagaimana dalam sosialisme, bukanlah keadilan, malah justru dipandang sebagai ketidakadilan. Sebab Islam menghargai prestasi, etos kerja dan kemampuan seseorang dibanding orang yang malas.

Dasar dari sikap yang koperatif ini tidak terlepas dari prinsip Islam yang menilai perbedaan pendapatan sebagai sebuah sunnatullah. Landasannya, antara lain bahwa etos kerja dan kemampuan seseorang harus dihargai dibanding seorang pemalas atau yang tidak mampu berusaha. Bentuk penghargaannya adalah sikap Islam yang memperkenankan pendapatan seseorang berbeda dengan orang lain, karena usaha dan ikhtiarnya.

Firman Allah,

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۗ فَمَا الَّذِينَ تَبَدَّلُوا بِرَادَى
رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۗ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ تَتَجَدَّدُونَ ﴿٧١﴾

Artinya : 71. Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Maka Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah .

Namun, orang yang diberi kelebihan rezeki, harus mengeluarkan sebagian hartanya untuk kelompok masyarakat yang tidak mampu (dhu'afa). Sehingga seluruh masyarakat terlepas dari kemiskinan absolut.

Konsep keadilan sosio-ekonomi yang diajarkan Islam menginginkan adanya pemerataan pendapatan secara proporsional. Dalam tataran ini, dapat pula dikatakan bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi yang dilandaskan pada kebersamaan. Karena itu tidak aneh, bila anggapan yang menyatakan bahwa prinsip keadilan sosio-ekonomi Islam mempunyai kemiripan dengan sistem sosialisme. Bahkan pernah ada pendapat yang menyatakan bahwa sistem sosialisme itu jika ditambahkan dan dimasukkan unsur-unsur Islam ke dalamnya, maka ia menjadi Islami.

Dengan demikian, pendapat dan pandangan yang menyatakan kemiripan sistem keadilan sosio Islam dengan sosialisme tidak sepenuhnya benar, malah lebih banyak keliruannya. Prinsip ekonomi sosialisme, yang menolak kepemilikan individu dan menginginkan pemerataan pendapatan, jelas berbeda dengan prinsip ekonomi Islam. Sosialisme sama sekali tidak mengakui hak milik individu.

Reaksi marxisme dibungkus secara politis revolusioner dalam paham komunis yang intinya mengajarkan bahwa seluruh unit ekonomi dikuasakan kepada negara yang selanjutnya didistribusikan kepada seluruh masyarakat secara merata. Hal ini didasarkan semangat pertentangan terhadap pemilikan individu.

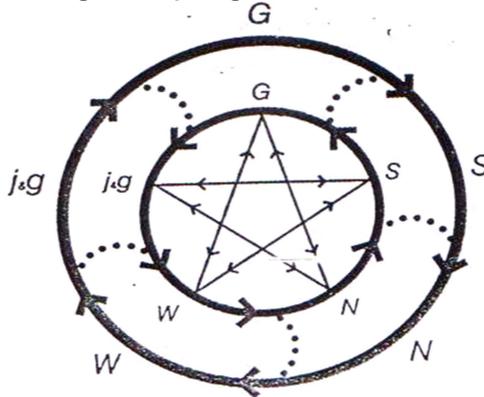
Sedangkan dalam ekonomi Islam, penegakkan keadilan sosio-ekonomi dilandasi oleh rasa persaudaraan (ukhuwah), saling mencintai (mahabbah), bahu membahu (takaful) dan saling tolong menolong (ta'awun), baik antara si kaya dan si miskin maupun antara penguasa dan rakyat.

Dalam hubungannya dengan keadilan, Khaldun (2000), menawarkan model yang disebut sebagai “*Dynamic Model of Islam*” atau Model Dinamika. Model Dinamika adalah sebuah rumusan yang terdiri dari delapan prinsip kebijaksanaan yang terkait dengan prinsip yang lain secara interdisipliner dalam membentuk kekuatan bersama dalam satu lingkaran sehingga awal dan akhir lingkaran tersebut tidak dapat dibedakan. Rumusan Model Dinamika atau *Dynamic Model of Islam* tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan penguasa/ pemerintah tidak dapat diwujudkan kecuali dengan implementasi Syariah;
2. Syariah tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan penguasa/ pemerintah;
3. Penguasa/ pemerintah tidak dapat memperoleh kekuasaan kecuali dari rakyat;
4. Masyarakat tidak dapat ditopang kecuali oleh kekayaan;
5. Kekayaan tidak dapat diperoleh kecuali dari pembangunan;
6. Pembangunan tidak dapat dicapai kecuali melalui keadilan;
7. Keadilan merupakan standar yang akan dievaluasi Allah pada umat-Nya;
8. Penguasa/ pemerintah dibebankan dengan adanya tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan.

Rumusan ini mencerminkan karakter interdisipliner dan dinamis dari analisis Ibnu Khaldun yang menghubungkan semua variabel-variabel sosial, ekonomi dan politik, termasuk Syariah (S), kekuasaan politik atau Governance (G), masyarakat atau Nation (N), kekayaan/ sumber daya

atau Wealth (W), pembangunan atau growth (g) dan keadilan atau justice (j). Variabel-variabel tersebut berada dalam satu lingkaran yang saling tergantung karena satu sama lain saling mempengaruhi.



Gambar 3.1. Dynamic Model : Reformasi Pembangunan Masyarakat Madani Ibnu Khaldun (Ahmadi Thaha, 2000)

Cara kerja lingkaran ini menyerupai rantai reaksi untuk jangka waktu yang panjang dan merupakan sebuah kedinamisan yang diperkenalkan dalam seluruh analisis. Dimensi ini menjelaskan bagaimana faktor-faktor politik, agama, sosial dan ekonomi saling mempengaruhi selama kurun waktu tertentu sehingga faktor-faktor tersebut dapat menuntun suatu peradaban menuju pembangunan dan kemunduran atau kejayaan dan keruntuhan. Dalam rumusan ini, tidak ada klausula *ceteris paribus* karena tidak ada satu variabel yang konstan. Satu variabel bias berfungsi sebagai mekanisme pemicu dan variabel yang lain dapat bereaksi atau tidak dalam arah yang sama. Oleh karena itu, kegagalan di satu sektor tidak akan menyebar ke variabel yang lain karena sektor yang gagal tersebut akan

diperbaiki atau kemunduran suatu peradaban akan lebih lama. Sebaliknya jika sektor yang lain bereaksi sama layaknya dengan mekanisme pemicu, maka kegagalan itu akan memperoleh momentum melalui rantai reaksi yang berkaitan, sehingga kegagalan ini membutuhkan waktu yang lama untuk mengidentifikasi penyebab dan akibatnya. Lingkaran sebab akibat ini akan mengacu kepada “Lingkaran Keadilan” (*Circle of Equity*).

3.3. Penekanan Keadilan Distributif dalam Islam

Hal yang paling inti dari bangunan ekonomi Islam adalah tujuannya untuk menerapkan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan dalam alokasi sumberdaya potensial bagi masyarakat. Kerangka keadilan juga memungkinkan setiap orang memiliki peluang, kontrol, dan manfaat dari alokasi pembangunan yang berlangsung secara proporsional.

Islam sangat menjunjung tinggi hak kepemilikan individu atas sesuatu. Namun, mekanisme kepemilikan tersebut tidak dapat dilakukan oleh semua individu. Misalnya, ketentuan penyebutan orang yang berkuasa (kepemilikan kekuasaan), berkeahlian atau sejenisnya, akan mendapatkan “lebih” sehingga cenderung menghambat pemerataan kesejahteraan. Maka, diperlukan sistem yang menjamin terjadinya redistribusi dalam perekonomian.

Distribusi di tinjau dari segi kebahasaan berarti proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan, diantaranya sering kali melalui perantara (Collins dalam Mannan (1997). Definisi yang dikemukakan Collins di atas,

memiliki pemahaman yang sempit apabila dikaitkan dengan topik kajian di bahas. Hal ini disebabkan karena definisi tersebut cenderung mengarah pada perilaku ekonomi yang bersifat individual. Namun dari definisi di atas dapat di tarik suatu pemahaman, di mana dalam distribusi terdapat sebuah proses pendapatan dan pengeluaran dari sumber daya yang dimiliki oleh negara (mencakup prinsip *take and give*).

Adapun prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan Islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja. (Rahman, 1999 : 93)

Selain itu, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa posisi distribusi dalam aktifitas ekonomi suatu pemerintahan amatlah penting, hal ini dikarenakan distribusi itu sendiri menjadi tujuan dari kebijakan fiskal dalam suatu pemerintahan (selain fungsi alokasi). Adapun distribusi, seringkali diaplikasikan dalam bentuk pungutan pajak (baik pajak yang bersifat individu maupun pajak perusahaan). Akan tetapi masyarakat juga dapat melaksanakan swadaya melalui pelembagaan ZIS, di mana dalam hal ini pemerintah tidak terlibat langsung dalam mobilisasi pengelolaan pendapatan ZIS yang diterima. (Karim, 1992 : 89-90)

Pembahasan tentang redistribusi pendapatan tidak lepas dari pembahasan tentang konsep distribusi. Teori distribusi diharapkan dapat mengatasi masalah distribusi pendapatan antara berbagai kelas dalam masyarakat.

Mannan (1997), menyebutkan bahwa teori ekonomi modern tentang distribusi merupakan suatu teori yang menetapkan harga jasa produksi. Untuk itu ia berusaha menemukan nilai jasa dari berbagai faktor produksi dan nilai-nilai etik tentang pemilikan faktor-faktor produksi.

Zarqa dalam Rahardjo (2002:165), mengatakan, ada beberapa faktor yang menjadi dasar redistribusi yaitu tukar-menukar (*exchange*), kebutuhan (*need*), kekuasaan (*power*), sistem sosial dan nilai etika (*social system and ethical values*). Sejalan dengan prinsip pertukaran (*exchange*) antara lain seseorang memperoleh pendapatan yang wajar dan adil sesuai dengan kinerja dan kontribusi yang diberikan.

Distribusi juga didasarkan atas kebutuhan, seseorang memperoleh upah karena pekerjaannya dibutuhkan oleh pihak lain. Satu pihak membutuhkan materi untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarga dan pihak lain membutuhkan tenaga kerja sebagai faktor produksi. Kekuasaan (*power*) juga berperan penting. Sebab, seseorang yang memiliki kekuasaan atau otoritas cenderung mendapatkan lebih banyak karena ada kemudahan akses.

Beberapa kebijakan redistribusi dalam sebuah negara juga seringkali diadopsi dari sistem dan nilai-nilai sosial yang ada, sebagai contoh yaitu: a) alokasi pendapatan nasional untuk para pendeta dalam suatu kelompok masyarakat; b) alokasi dana untuk para pejabat publik; c) alokasi dana untuk institusi sosial; d) kebijakan tentang larangan atas transaksi barang-barang yang tidak bermanfaat dan lain-lain. Zarqa melihat begitu pentingnya

memelihara kelancaran distribusi ini agar tercipta sebuah kegiatan ekonomi yang dinamis, adil, dan produktif.

Lebih lanjut Zarqa, mengemukakan beberapa prinsip distribusi dalam ekonomi Islam yaitu: 1) pemenuhan kebutuhan bagi semua makhluk; 2) menimbulkan efek positif bagi pemberi itu sendiri misalnya zakat, selain dapat membersihkan diri dan harta *muzakki* (pemberi zakat) juga meningkatkan keimanan dan menumbuhkan kebiasaan berbagi dengan orang lain; 3) menciptakan kebaikan di antara semua orang antara yang kaya dan miskin; 4) mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan; 5) pemanfaatan lebih baik terhadap sumberdaya alam dan asset tetap; 6) memberikan harapan pada orang lain melalui pemberian.

Menurut Antonio (2000), pada dasarnya Islam memiliki dua sistem distribusi utama, yakni distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Sistem distribusi pertama, bersifat komersial, berlangsung melalui proses ekonomi. Menurut Yusuf Qardhawi (1997), ada 4 aspek terkait keadilan distribusi yaitu: 1) gaji yang setara (*al ujah al mitsl*) bagi para pekerja, 2) *profit* atau keuntungan untuk pihak yang menjalankan usaha atau yang melakukan perdagangan melalui mekanisme *mudlârabah* maupun bagi hasil (*profit sharing*) untuk modal dana melalui mekanisme *musyarakah*, 3) biaya sewa tanah serta alat produksi lainnya, 4) tanggung jawab pemerintah terkait dengan peraturan dan kebijakannya.

Adapun sistem yang kedua, berdimensi sosial, Islam menciptakannya untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Mengingat tidak semua orang mampu terlibat dalam proses ekonomi karena yatim piatu atau jompo dan cacat tubuh, Islam memastikan distribusi bagi mereka dalam bentuk zakat, infak dan *shadaqah*.

Keindahan lain sistem redistribusi dalam Islam adalah warisan. Dengan warisan Islam ingin memastikan bahwa asset dan kekuatan ekonomi tidak boleh terpusat pada seseorang saja, betapa pun kayanya seseorang, jika si bapak meninggal maka anak, isteri, ibu, bapak, kakek dan kerabat lainnya akan kebagian peninggalannya.

Untuk khalayak umum, Islam memperkenalkan instrumen distribusi lain yaitu wakaf, yang bentuk dan caranya bisa sangat banyak sekali, dari mulai gedung, uang tunai, buku, tanah, bahan bangunan, kendaraan, saham, serta asset-asset produktif lainnya. Berbeda dengan yang lainnya, wakaf tidak dibatasi oleh kaya atau miskin atau pertalian darah serta kekerabatan. Wakaf adalah fasilitas umum yang siapa pun boleh menikmatinya

Konsep keadilan distributif dalam Ekonomi Islam ini meniscayakan berjalannya sistem ekonomi tanpa riba dan sebagai gantinya dikembangkan transaksi syariah melalui sistem bagi hasil maupun jual beli, implementasi zakat yang memungkinkan adanya transfer kekayaan dari muzakki pada *mustahik* (yang berhak menerima zakat), peran Negara sebagai pengawas "*muhtasib*" (auditor) dalam melakukan regulasi yang berpihak.

BAB 4

UPAH DAN TENAGA KERJA PADA PERSPEKTIF SYARIAH ISLAM

Bekerja sebagai sarana pembangunan perekonomian masyarakat, telah diperintahkan dalam Islam. Allah azza wajalla berfirman :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦٢﴾

Artinya : apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (QS Al-Jumuah (62) : 10).

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿٦٧﴾

Artinya : Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (QS.Al Mulk (67) : 15)

وَجَعَلْنَا الْيَوْمَ مَعَاشًا ﴿٧٨﴾

Artinya : dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, (QS. An-Nabaa (78) : 11)

Berdasarkan ayat-ayat di atas, umat Islam diseru untuk bekerja dan berpenghasilan agar mampu meraih kesejahteraan, memenuhi kebutuhan diri dan keluarga, menjauhi diri dari meminta-minta dan menjadi beban orang lain.

Di dalam dunia usaha, pengupahan merupakan hal yang sewajarnya sebagai bentuk kompensasi atas kontribusi yang diberikan pekerja atau buruh kepada perusahaan.

Jadi ketika perusahaan merekrut pekerja atau buruh yang diharapkan adalah pekerja/buruh dapat menjalankan serangkaian pekerjaannya untuk menghasilkan barang atau jasa yang mendukung kegiatan usaha sehingga menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.

Keuntungan yang didapat tersebut salah satunya digunakan perusahaan untuk memberikan kompensasi berupa upah kepada pekerja/buruh. Jadi keberadaan pekerja/buruh dalam suatu perusahaan adalah dalam kerangka bisnis kemitraan dan bukan kerangka kegiatan sosial.

Konsep upah dalam Islam juga dibahas dalam Al Qur'an sbb :

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾

Artinya : dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah

dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. At-Taubah (9) : 105)

Dalam menafsirkan At Taubah ayat 105 ini, Quraish Shihab menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah sbb : “Bekerjalah Kamu, demi karena Allah semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu”. Tafsir dari melihat dalam keterangan di atas adalah menilai dan memberi ganjaran terhadap amal-amal itu. Sebutan lain daripada ganjaran adalah imbalan atau upah atau *compensation*.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya : Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik[839] dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (QS. An Nahl : 97)

[839] Ditekankan dalam ayat ini bahwa laki-laki dan perempuan dalam Islam mendapat pahala yang sama dan bahwa amal saleh harus disertai iman.

Dalam menafsirkan An-Nahl ayat 97 ini, Quraish Shihab menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah sbb : “Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, apapun jenis kelaminnya, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia adalah mukmin yakni amal yang dilakukannya lahir atas dorongan keimanan yang shahih, maka sesungguhnya pasti akan kami berikan kepadanya masing-masing kehidupan yang baik di dunia ini dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka semua di dunia dan di akherat dengan pahala yang lebih baik dan berlipat ganda dari apa yang telah mereka kerjakan”.

Tafsir dari balasan dalam keterangan di atas adalah balasan di dunia dan di akherat. Ayat ini menegaskan bahwa balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akherat. Amal Saleh sendiri oleh Syeikh Muhammad Abduh didefinisikan sebagai segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, keluarga, kelompok dan manusia secara keseluruhan. Sementara menurut Syeikh Az-Zamakhsari, Amal Saleh adalah segala perbuatan yang sesuai dengan dalil akal, al-Qur'an dan atau Sunnah Nabi Muhammad Saw. Menurut Definisi Muhammad Abduh dan Zamakhsari diatas, maka seorang yang bekerja pada suatu badan usaha (perusahaan) dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi/menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, maka seorang karyawan yang bekerja dengan benar, akan menerima dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akherat.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

Artinya : "Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal saleh tentulah Kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan baik." (QS Al Kahfi : 30).

Berdasarkan tiga ayat diatas, yaitu At-Taubah 105, An-Nahl 97 dan Al-Kahfi 30, maka Imbalan dalam konsep Islam menekankan pada dua aspek, yaitu dunia dan akherat. Tetapi hal yang paling penting, adalah bahwa penekanan kepada akherat itu lebih penting daripada penekanan terhadap dunia (dalam hal ini materi) sebagaimana semangat dan jiwa Al-Qur'an surat Al-Qhashsash ayat 77.

وَأَبْتِغِ فِيْمَا ءَاتٰكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ

وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللهَ لَا

يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya : 77. dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Surat At Taubah 105 menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk bekerja, dan Allah pasti

membalas semua apa yang telah kita kerjakan. Yang paling unik dalam ayat ini adalah penegasan Allah bahwa motivasi atau niat bekerja itu mestilah benar. Sebab kalau motivasi bekerja tidak benar, Allah akan membalas dengan cara memberi azab. Sebaliknya, kalau motivasi itu benar, maka Allah akan membalas pekerjaan itu dengan balasan yang lebih baik dari apa yang kita kerjakan (An-Nahl : 97).

Lebih jauh Surat An-Nahl : 97 menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan gender dalam menerima upah / balasan dari Allah. Ayat ini menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi upah dalam Islam, jika mereka mengerjakan pekerjaan yang sama. Hal yang menarik dari ayat ini, adalah balasan Allah langsung di dunia (kehidupan yang baik/rezeki yang halal) dan balasan di akherat (dalam bentuk pahala).

Sementara itu, Surat Al-Kahfi : 30 menegaskan bahwa balasan terhadap pekerjaan yang telah dilakukan manusia, pasti Allah balas dengan adil. Allah tidak akan berlaku zalim dengan cara menyia-nyiakan amal hamba-Nya. Konsep keadilan dalam upah inilah yang sangat mendominasi dalam setiap praktek yang pernah terjadi di negeri Islam.

Lebih lanjut kalau kita lihat hadits Rasulullah saw tentang upah yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah s.a.w bersabda :

“Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu; sehingga barang siapa mempunyai saudara di

bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri); dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu membebarkannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya).” (HR. Muslim).

Dari hadits ini dapat didefinisikan bahwa upah yang sifatnya materi (upah di dunia) mestilah terkait dengan keterjaminan dan kecukupan pangan dan sandang. Perkataan : “harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri)” , bermakna bahwa upah yang diterima harus menjamin makan dan pakaian karyawan yang menerima upah.

Dalam hadits yang lain, diriwayatkan dari Mustawrid bin Syadad Rasulullah s.a.w bersabda :

“Siapa yang menjadi pekerja bagi kita, hendaklah ia mencarikan isteri (untuknya); seorang pembantu bila tidak memilikinya, hendaklah ia mencarikannya untuk pembantunya. Bila ia tidak mempunyai tempat tinggal, hendaklah ia mencarikan tempat tinggal. Abu Bakar mengatakan: Diberitakan kepadaku bahwa Nabi Muhammad Saw. bersabda: “Siapa yang mengambil sikap selain itu, maka ia adalah seorang yang keterlaluan atau pencuri.” (HR. Abu Daud).

Hadits ini menegaskan bahwa kebutuhan papan (tempat tinggal) merupakan kebutuhan azasi bagi para

karyawan. Bahkan menjadi tanggung jawab majikan juga untuk mencari jodoh bagi karyawannya yang masih lajang (sendiri). Hal ini ditegaskan lagi oleh Doktor Abdul Wahab Abdul Aziz As-Syaisyani dalam kitabnya *Huququl Insan Wa Hurriyyatul Asasiyah Fin Nidzomil Islami Wa Nudzumil Ma'siroti* bahwa mencari istri juga merupakan kewajiban majikan, karena istri adalah kebutuhan pokok bagi para karyawan.

Sehingga dari ayat-ayat Al-Qur'an di atas, dan dari hadits-hadits di atas, maka dapat didefenisikan bahwa : Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (Adil dan Layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akherat (imbalan yang lebih baik).

Dari uraian diatas, paling tidak terdapat 2 Perbedaan konsep Upah antara Barat dan Islam: pertama, Islam melihat Upah sangat besar kaitannya dengan konsep Moral, sementara Barat tidak. Kedua, Upah dalam Islam tidak hanya sebatas materi (kebendaan atau keduniaan) tetapi menembus batas kehidupan, yakni berdimensi akherat yang disebut dengan Pahala, sementara Barat tidak. Adapun persamaan kedua konsep Upah antara Barat dan Islam adalah; pertama, prinsip keadilan (justice), dan kedua, prinsip kelayakan (kecukupan).

Hubungan antara upah dan tenaga kerja telah banyak dibahas dalam Islam antara lain, Nabi saw bersabda, yang artinya : *"Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya, dan beritahukan ketentuan gajinya, terhadap apa yang dikerjakan"*. (HR. Baihaqi)

Al Quran menjelaskan upah dan tenaga kerja :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ ۚ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ
وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ
كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ
اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka

hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalunya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah (2) : 282)

[179] Bermuamalah ialah seperti berjualbeli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

Dari ayat Al-Qur'an dan hadits riwayat Baihaqi di atas, dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada Kejelasan aqad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Aqad dalam perburuhan adalah aqad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Khusus untuk cara pembayaran upah, Rasulullah bersabda, yang artinya : "Dari Abdillah bin Umar, Rasulullah Saw. Bersabda: "Berikanlah upah orang upahan sebelum kering keringatnya". (HR. Ibnu Majah dan Imam Thabrani).

Dalam menjelaskan hadits itu, Qardhawi (1997), menjelaskan sebagai berikut : sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun, jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban. Selama ia mendapatkan upah secara penuh, maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detail dalam "peraturan kerja" yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa upah atau gaji merupakan hak karyawan selama karyawan tersebut

bekerja dengan baik. Jika pekerja tersebut tidak benar dalam bekerja (yang dicontohkan oleh Syeikh Qardhawi dengan bolos tanpa alasan yang jelas), maka gajinya dapat dipotong atau disesuaikan. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa selain hak karyawan memperoleh upah atas apa yang diusahakannya, juga hak perusahaan untuk memperoleh hasil kerja dari karyawan dengan baik. Bahkan Syeikh Qardhawi mengatakan bahwa bekerja yang baik merupakan kewajiban karyawan atas hak upah yang diperolehnya, demikian juga, memberi upah merupakan kewajiban perusahaan atas hak hasil kerja karyawan yang diperolehnya. Dalam keadaan masa kini, maka aturan-aturan bekerja yang baik itu, dituangkan dalam buku Pedoman Kepegawaian yang ada di masing-masing perusahaan

BAB 5

KESEJAHTERAAN KARYAWAN

Ekonomi adalah pengetahuan tentang peristiwa dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia secara perseorangan atau pribadi dan kelompok dalam memenuhi kebutuhan yang cenderung mengarah tidak terbatas dengan dihadapkan pada sumber-sumber pemenuhan yang terbatas. (Zadjuli, 1999).

Dalam bidang ekonomi, Islam memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dari sistem-sistem yang tengah berjalan. Ia memiliki akar dalam syari'at yang membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran-sasaran dan strategi (*Maqasid al-Shari'ah*) yang berbeda dari sistem-sistem sekuler yang menguasai dunia hari ini. Sasaran-sasaran yang dikehendaki Islam secara mendasar buka materiil. Mereka didasarkan atas konsep-konsep Islam sendiri tentang kebahagiaan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik yang sangat menekankan aspek persaudaraan, keadilan sosio ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spiritual umat manusia. Hal ini disebabkan karena adanya umat manusia memiliki kedudukan yang sama sebagai Khalifah Allah di muka bumi dan sekaligus sebagai hamba-Nya yang tidak akan dapat merasakan kebahagiaan dan ketenangan batin kecuali jika kebahagiaan sejati telah dicapai melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan materiil dan spiritual. (Chapra, dalam Abidin, 2000)

Maqasid Al Syariah berarti tujuan Allah SWT dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam (Abdullah, 2002). Sementara menurut Wahbah al Zuhaili (1986), *Maqasid Al Syariah* berarti nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh al-Syari' dalam setiap ketentuan hukum. (Zuhaili, 1986) Menurut Syathibi tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. (Mas'ud, 2000)

Maqasid Al Syariah, yang secara substansial mengandung kemashlahatan, menurut al Syathibi dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama maqasid al syari' (tujuan Tuhan). Kedua maqasid al mukallaf (tujuan mukallaf). Mayoritas peneliti membagi kemashlahatan menjadi dua macam, kemashlahatan akhirat yang dijamin oleh akidah dan ibadah dan kemashlahatan dunia yang dijamin oleh muamalat. (Romadlon al Buti, 1992).

Kemashlahatan yang menjadi tujuan syariat ini dibatasi dalam lima hal, agama, jiwa/nafs, akal, keturunan dan harta. Setiap hal yang mengandung penjagaan atas lima hal ini disebut masalah dan setiap hal yang membuat hilangnya lima hal ini disebut mafsadah

Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan utama kemaslahatan syariah adalah mendorong kesejahteraan manusia, yang bertujuan untuk perlindungan terhadap agama (*din*) diri (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*maal*). Ada dua pendekatan untuk mengukur kesejahteraan tersebut,

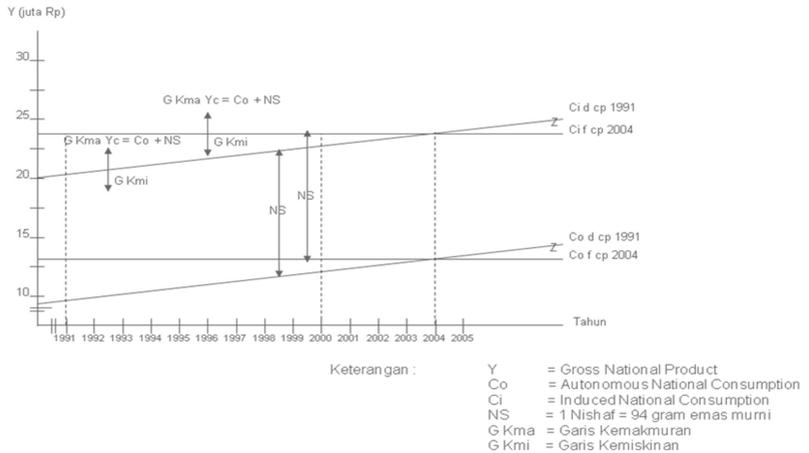
yaitu pendekatan pengukuran secara obyektif dan pendekatan pengukuran secara subyektif (Chapra, 2000:101). Sebagian besar yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi adalah pendapatan nyata rumah tangga yang dimiliki orang, yang disesuaikan dengan perbedaan ukuran rumah tangga dan komposisi demografi (Ravallion dan Lokshin, 2000). Ini dapat didefinisikan sebagai pendapatan total rumah tangga dibagi dengan sebuah garis kemiskinan yang memberikan biaya dari tingkat nilai guna (utility) beberapa referensi pada harga yang berlaku dan demografi rumah tangga. Di bawah kondisi tertentu, rasio ini dapat diinterpretasikan sebagai metrik uang yang nyata dari nilai guna yang mendefinisikan konsumsi yang lebih (Blackorby dan Donaldson, 1987).

Praktek yang standar adalah mengkalibrasi fungsi biaya dari perilaku permintaan konsumen. Parameter-parameter fungsi biaya adalah dapat dikenali secara umum dari perilaku permintaan pada saat atribut-atribut rumah tangga berubah (Pollack dan Wales, 1979). Masalah ini masih mengganggu jika diaplikasikan dalam dunia nyata dan intepretasi kebijakan data pada kesejahteraan ekonomi meliputi profil kemiskinan mengarahkan untuk memberikan ukuran kemiskinan yang konsisten melwati subkelompok dari masyarakat.

Organisasi-organisasi internasional menggunakan indikator kualitas hidup untuk mengevaluasi dan membandingkan kinerja sosio-ekonomi negara Misalnya yang terkenal adalah Human Development Index dari United Nations. Untuk membangun masing-masing indeks, membutuhkan subindikator untuk dipilih.

Pilihan ini bergantung pada dimensi yang dipertimbangkan relevan, misalnya pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan pendapatan (Carbonell,2002). Zadjuli (2008) menguraikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam tiga hal mendasar pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, yang diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; dan standar hidup yang diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan menjadi paritas daya beli. Nilai indeks ini berkisar antara 0 -100. Zadjuli (2008) membuat peringkat Indeks Pembangunan Manusia untuk tingkat nasional dan menempatkan Propinsi Sulawesi Selatan dalam rangking ke 17 dari 30 Propinsi di Indonesia.

Beberapa ekonom telah mengubah data pada persepsi kesejahteraan itu sendiri sebagai sumber informasi tambahan untuk merlakukan idendifikasi. Ada beberapa pendekatan, Zadjuli (2007), memperkenalkan garis kemiskinan dan kemakmuran menurut Islam (lihat gambar 5.1), dimana:



Gambar 5.1. Garis Kemiskinan dan Kemakmuran Menurut Islam

Karakter ilmu dan harta serta sumber rizki dan flatah manusia dalam pengambilan keputusan tersebut maka dapat disusun *A Normative Macro Model* secara Holistic. Menurut Zadjuli (2007), manusia akan menjadi berdaya apabila manusia itu beriman dan berilmu. Allah telah menjanjikan bagi orang yang beriman dan berilmu serta mempraktekan keimanan dan keilmuannya tersebut untuk diri sendiri, keluarga, tetangga, maupun orang yang lain maka manusia tersebut oleh Allah SWT akan diangkat posisi/kedudukannya sederajat lebih tinggi bila dibandingkan dengan orang yang beriman dengan ilmu yang lebih sedikit. Dalam rangka manusia berkegiatan untuk mencari ilmu guna memperoleh harta/riski atau sebaliknya mencari harta guna menuntut tambahan ilmu serta sekaligus melakukan kegiatan untuk mencari ilmu dan harta, maka akan muncul masalah pemilihan apakah mencari ilmu dulu, harta atau sekaligus keduanya.

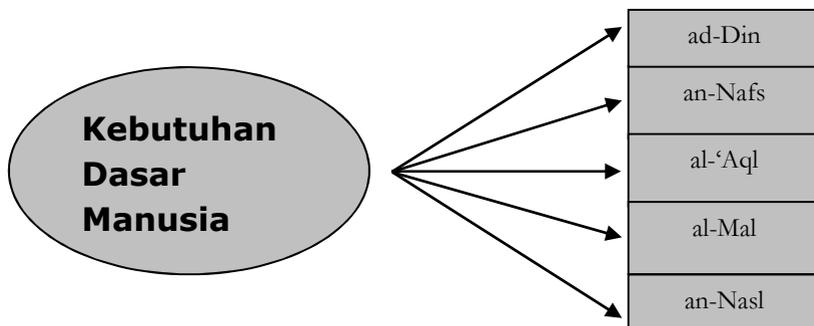
Pendekatan lain yang dilakukan Van Praag (1968) memperkenalkan *the Income Evaluation Question (IEQ)* yang bertanya apakah pendapatan dianggap “sangat jelek”, “jelek”, “tidak baik”, “tidak jelek”, “baik”, dan “sangat baik”. Metode yang lain didasarkan pada *the Minimum Income Question (MIQ)* yang bertanya apakah pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mencukupi.

Garis kemiskinan subyektif dapat dikalibrasikan terhadap jawaban (Kapteyn, 1988). Dengan pendekatan ini, indikator kesejahteraan masih diambil untuk mengukur pendapatan secara obyektif atau pengeluaran yang dinormalisasi dengan (subyektif) garis kemiskinan. Carbonell (2000), menggunakan *Subjective Well-Being (SWB)* atau *General Satisfaction (GS)* individu untuk menjawab pertanyaan kesejahteraan subyektif. *Welfare* menggambarkan kepuasan individu dalam arti yang sempit, yaitu kepuasan financial, sedangkan *well-being* merupakan kepuasan individu dalam arti yang luas, yaitu kepuasan individu dalam kehidupan. Tanggapan terhadap pertanyaan subyektif mengenai kepuasan dengan domain yang kongkrit dari kehidupan merujuk pada Domain Satisfaction (DS), yang dalam literatur ekonomi terdiri dari Financial Satisfaction (FS), Job Satisfaction (JS) dan Health Satisfaction (HS)

Konsep nilai guna dalam Islam merupakan sebuah konsep yang lebih luas daripada konsep nilai guna dalam ekonomi kesejahteraan konvensional. (*masalah-al-Ibad*). Bentuk *masalah* merujuk pada kesejahteraan yang luas dari manusia. Menurut Al-Shatibi, *masalah* merupakan

kepemilikan atau kekuatan barang atau jasa yang menguasai elemen dasar dan sasaran kehidupan manusia di dunia. Ada lima elemen dasar kehidupan di dunia, yaitu kehidupan (*al-nafs*), kepemilikan (*al-mal*), kebenaran (*ad-din*), kecerdasan (*al-aql*) dan keturunan (*al-nasl*). Semua barang dan jasa yang mempunyai kekuatan untuk menaikkan lima elemen dasar ini yang dikatakan mempunyai *masalah* dan barang dan jasa yang mempunyai *masalah* akan dinyatakan sebagai kebutuhan. Keinginan dalam ekonomi konvensional ditentukan oleh konsep nilai guna sementara kebutuhan dalam Islam ditentukan oleh konsep *masalah* (Khan, 1989).

Jika digambarkan dalam bentuk bagan seperti yang terdapat dalam gambar 2.2. Pada gambar tersebut memberikan pemahaman pada bahwa orientasi yang ingin dicapai oleh proses produksi menjangkau pada aspek yang universal dan berdimensi spiritual. Inilah yang menambah keyakinan manusia akan kesempurnaan ajaran Islam yang tertulis dalam QS. Al-Maidah [5]: 3 yang artinya : “*Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni’mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu*”. Tidak ada keraguan bagi seorang muslim untuk memberikan kebenaran bagi ajaran Allah Swt yang ada dalam al-Qur’an al-Karim.



Gambar 5.2. Kebutuhan Dasar Manusia (Khan, 1989)

Kriteria kesejahteraan akan bekerja dalam kondisi untuk memilih di antara proyek-proyek investasi yang berbeda untuk mengalokasikan sumberdaya dengan dasar *Syariah* secara Islam. Memanglah, sebagian besar kriteria ini tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Meskipun, kriteria yang disebutkan tersebut merupakan kriteria yang hanya indikatif, tetapi tidak yang mendalam. Kriteria kesejahteraan tersebut, antara lain peningkatan ideologi, efisien penggunaan sumberdaya, keadilan dalam distribusi pendapatan, baik secara kolektif, prioritas terhadap kebutuhan yang mendesak, stabilitas, kepastian, keberlangsungan, produktivitas, pertimbangan manusia, universal, etikan dan moral (Choudhury, 1991).

5.1 *Ad-din*

Ad-din adalah agama Allah yang memberikan pedoman kepada umat manusia, yang menjamin akan mendatangkan kebahagiaan hidup perseorangan dan kelompok, jasmani dan rohani, material dan spiritual, di dunia kini dan di akhirat kelak.

Ad-din diajarkan kepada umat manusia dengan

perantaraan para Rasul Allah silih berganti, sejak Nabi Adam a.s.hingga yang terakhir Nabi Muhammad saw. Ad-din berisi pedoman hidup yang meliputi bidang aqidah, ibadah dan muamalah.

5.2 An-Nafs

Manusia memiliki jiwa (an-nafs) yang merupakan jauhar, yaitu yang berdiri sendiri, tidak berada di tempat manapun dan juga tidak bertempat pada apapun. Jiwa adalah alam sederhana yang tidak terformulasi dari berbagai unsur (materi) sehingga tidak mengalami kehancuran sebagaimana benda materi. Karena itu, kematian bagi manusia sesungguhnya hanyalah kematian tubuh dimana yang hancur dan terurai kembali ke asalnya adalah tubuh, sedangkan jiwa tidak akan hilang dan tetap eksis, sebagaimana firman Allah di Ali 'Imran [3]: 169.

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

Artinya : “Janganlah engkau sekali-kali mengira bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati: bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb mereka dengan mendapatkan rizki”. (Ali 'Imran [3]: 169)

Jiwa (an-nafs) merupakan esensi yang sempurna dan tunggal yang tidak muncul selain dengan cara mengingat, menghafal, berpikir, membedakan dan mempertimbangkan sehingga dikatakan bahwa ia menerima seluruh ilmu. Ia mengetahui masalah-masalah yang rasional maupun yang ghaib. Dialah yang sanggup memahami, berpikir dan merespon segala yang ada; bukan tubuh maupun otak yang sebenarnya hanyalah sebetuk materi.

Bahkan Imam Al-Ghazali ra mengatakan bahwa ilmu pengetahuan sebenarnya adalah suatu kondisi yang ada pada jiwa. Adanya ilmu menggambarkan jiwa yang berpikir tenang (an-nafs an-nathiqah al-muthmainnah) tentang hakikat segala sesuatu, artinya adanya pengetahuan tentang al-haq itu merepresentasikan tentang jiwa. Ini dikarenakan jiwa di dalam tubuh akan berusaha mencari kesempurnaan, agar ia sanggup mengikuti derajat malaikat yang dekat dengan Allah (muqarrabun), di mana Allah adalah sumber segala pengetahuan juga merupakan obyek ilmu yang paling utama, paling tinggi, dan paling mulia.

5.3 Al-Aql

Kata akal berasal dari kata dalam bahasa Arab, al-'aql. Kata al-'aql adalah mashdar dari kata 'aqola – ya'qilu – 'aqlan yang maknanya adalah “ fahima wa tadabbaro “ yang artinya “paham (tahu, mengerti) dan memikirkan (menimbang)“. Maka al-'aql, sebagai mashdarnya, maknanya adalah “ kemampuan memahami dan memikirkan sesuatu “. Sesuatu itu bisa ungkapan, penjelasan, fenomena, dan lain-lain, semua yang ditangkap oleh panca indra.

Dikatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj (22) ayat 46, yang artinya, “ Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu ada bagi mereka al-qolb (yang dengan al-qolb itu) mereka memahami (dan memikirkan) dengannya atau ada bagi mereka telinga (yang dengan telinga itu) mereka mendengarkan dengannya, maka sesungguhnya tidak buta mata mereka tapi al-qolb (mereka) yang di dalam dada.” Dari ayat ini maka dapat diketahui bahwa al-'aql itu ada di dalam al-qolb, karena, seperti yang dikatakan dalam ayat

tersebut, memahami dan memikirkan (ya'qilu) itu dengan al-qolb dan kerja memahami dan memikirkan itu dilakukan oleh al-'aql maka tentu al-'aql ada di dalam al-qolb, dan al-qolb ada di dalam dada. Yang dimaksud dengan al-qolb tentu adalah jantung, bukan hati dalam arti yang sebenarnya karena ia tidak berada di dalam dada, dan hati dalam arti yang sebenarnya padanan katanya dalam bahasa Arab adalah al-kabd.

5.4 Al-Maal

Al Maal (harta) dalam bahasa Arab bermakna emas, perak dan hewan ternak. Sedangkan menurut terminology syariah, al maal merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai dan boleh dimanfaatkan serta kepemilikannya diperoleh dengan cara yang sesuai syariah.

Nabi Muhammad SAW dalam memandang harta berpedoman bahwa pada hakekatnya harta adalah milik Allah dan manusia diberi kuasa (amanah) untuk mengelolanya dengan baik. Manusia tidak memiliki kekuasaan mutlak terhadap harta dan harus menafkahkan sebagian daripadanya sesuai syariat Allah seperti di dalam Al-Qur'an Surat Al Hadiid ayat 5-7 sebagai berikut :

لَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٥﴾ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي
 النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۚ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٦﴾ ءَامِنُوا بِاللَّهِ
 وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ
 وَأَنْفَقُوا هُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

Artinya : *Kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi. dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan. Dialah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam. dan dia Maha mengetahui segala isi hati. Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah Telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.*

5.5 An-Nasi

Islam adalah ajaran hidup yang mengkombinasikan secara harmonis (tawazun takamuli) semua aspek kemanusiaan baik spiritual, material termasuk ekonomi maupun kesehatan. Ajaran Islam tidak bertentangan dengan ilmu kedokteran khususnya yang terkait dengan hukum kesehatan. Al-Qur'an sendiri sangat memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan fisik keluarga (QS. Al-Baqarah:233) Di dalam Al Qur'an dan Hadits tidak ada nash yang sharih (clear statement) yang melarang ataupun yang memerintahkan pembatasan keturunan secara eksplisit. Karena itu, hukum pembatasan keturunan harus dikembalikan kepada kaidah hukum Islam (qaidah fiqhiyah) yang menyatakan: "Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, kecuali/sehingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya." Selain itu beberapa ayat Al Qur'an dan Hadits Nabi yang memberikan indikasi bahwa pada dasarnya Islam membolehkan orang Islam membatasi keturunan. Bahkan kadang-kadang hukum keturunan itu bisa

berubah dari mubah (boleh) menjadi sunnah, wajib makruh atau haram, seperti halnya hukum perkawinan bagi orang Islam, yang hukum asalnya juga mubah. Hukum mubah itu bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi individu Muslim yang bersangkutan, selain juga memperhatikan perubahan zaman, tempat dan keadaan masyarakat.

Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam yang berbunyi: "Hukum-hukum itu bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat dan keadaan." Adapun ayat-ayat Al Qur'an yang memberi landasan hukum bagi KB dalam pengertian *tandzim nasl* (pengaturan kelahiran), antara lain QS.An-Nisa':9, Al Baqarah: 233, Luqman:14, dan Al-Ahqaf:15. Ayat-ayat di atas memberi petunjuk bahwa perlu memperhatikan keseimbangan antara mengusahkan keturunan dengan:

- a. Terpeliharanya kesehatan ibu dan anak, terjaminnya keselamatan jiwa ibu karena beban jasmani dan rohani selama hamil, melahirkan, menyusui dan memelihara anak serta timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan dalam keluarga. (*hifdzu nafs*)
- b. Terpeliharanya kesehatan jiwa, kesehatan jasmani dan rohani anak serta tersedianya pendidikan dan perawatan yang baik bagi anak. (*hifdzu nasab*)
- c. Terjaminnya keselamatan agama (*hifdzu din*) orang tua yang dibebani kewajiban mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.

BAB 6

IMPLEMENTASI KEPEMIMPINAN ISLAM DALAM KEADILAN DAN KESEJAHTERAAN

6.1 Kepemimpinan Islam, Keadilan Distributif dan Kesejahteraan Karyawan

Peran kepemimpinan Islam ditinjau dari Al-Qur'an dan Sunnah terlihat dari penegasan Allah Ta'ala dengan menyuruh manusia untuk meneladani Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam baik dalam kesabaran, keteguhan, dan kesungguhan. Oleh karena itulah Allah berfirman untuk orang yang takut, goncang dan hilang keberanian dengan firmanNya di dalam surah al-Ahzab ayat 21 : *Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.* Kemudian di dalam surah An-Nisa ayat 59 disebutkan, *Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.* Dalam menyempurnakan karakter seorang pemimpin maka dalam Islam perlu memiliki empat sifat yakni : shiddiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), fathonah (arif, cerdas) dan tabligh (komunikatif).

Studi teoritik tentang kepemimpinan Islam dilakukan Beekun dan Badawi (1999), dalam "*The Leadership Process in Islam*" yang melihat fungsi sebagai pemimpin akan melewati empat tahapan yakni : iman, Islam, taqwa, dan ikhsan. Studi empirik tentang kepemimpinan oleh Nowack (2004), menyimpulkan bahwa pegawai yang menilai atasannya memiliki praktek kepemimpinan yang buruk menyebabkan pegawai memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk keluar dari organisasi dan stress kerja tinggi. Yousef (1998), meneliti hubungan antara pendekatan kepemimpinan dengan outcome dari pekerjaan (kepuasan kerja dan kinerja) yang dimoderatori oleh komitmen organisasional. Peneliti lain Fletcher (1999), yang meneliti pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pada suatu program implementasi kualitas layanan di Afrika Selatan. Salah satu hasil dari penelitian ini adalah kinerja dari program implementasi kualitas layanan dipengaruhi oleh pengetahuan atau keahlian pimpinan.

Faktor keadilan distributif dari landasan Al-Qur'an dan Sunnah tersebut dalam al-Qur'an surat al-Mumtahanah ayat 8 yang artinya : *Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.* Juga di dalam surat al-Maidah ayat 8 : *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada*

takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Teliti apa yang kamu kerjakan.

Studi teoritik mengenai keadilan distributif dapat ditelusuri pada konsep yang dikemukakan Zarqa (2002) yang melihat begitu pentingnya memelihara kelancaran distribusi ini agar tercipta sebuah kegiatan ekonomi yang dinamis, adil, dan produktif. Menurut Antonio (2000), pada dasarnya Islam memiliki dua sistem distribusi utama, yakni distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar serta sistem distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat. Sistem distribusi pertama, bersifat komersial, berlangsung melalui proses ekonomi. Menurut Yusuf Qardhawi (1997), ada 4 aspek terkait keadilan distribusi yaitu: 1) gaji yang setara (*al ujah al mitsl*) bagi para pekerja, 2) profit atau keuntungan untuk pihak yang menjalankan usaha atau yang melakukan perdagangan melalui mekanisme *mudlârabah* maupun bagi hasil (*profit sharing*) untuk modal dana melalui mekanisme *musyarakah*, 3) biaya sewa tanah serta alat produksi lainnya, 4) tanggung jawab pemerintah terkait dengan peraturan dan kebijakannya. Adapun sistem yang kedua, berdimensi sosial, Islam menciptakannya untuk memastikan keseimbangan pendapatan di masyarakat.

Pada studi empirik, hasil penelitian Rahman (1999) yang dipublikasikan *International Journal of Islamic Financial Services*, yang menyimpulkan prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan Islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara

golongan tertentu saja. Sementara penelitian Tjahyono menilai bahwa, modal sosial berperan memoderasi pengaruh kedua jenis keadilan pada kepuasan dan komitmen karyawan. Mereka yang memiliki modal sosial tinggi cenderung bersikap lebih stabil terhadap derajat keadilan, sedangkan mereka yang memiliki modal sosial rendah cenderung lebih reaktif.

Faktor kesejahteraan memiliki landasan Al-Qur'an dan Sunnah tersebut dalam al-Qur'an QS. Thaha (20 : 118) :

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿١١٨﴾

Artinya : 118. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang,

Kemudian di surah lain dijelaskan :

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴿٧﴾

Artinya : agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu.. (QS. Al-Hasyr (59:7)

Studi teoritik mengenai kesejahteraan diungkapkan Al-Shatibi, dengan menggunakan konsep *maslahah* yang merupakan kepemilikan atau kekuatan barang atau jasa yang menguasai elemen dasar dan sasaran kehidupan manusia di dunia. Ada lima elemen dasar kehidupan di dunia, yaitu kehidupan (*al-nafs*), kepemilikan (*al-mal*), kebenaran (*ad-din*), kecerdasan (*al-aql*) dan keturunan (*al-nasl*). Semua barang dan jasa yang mempunyai kekuatan untuk menaikkan lima elemen dasar ini yang dikatakan

mempunyai *masalah* dan barang dan jasa yang mempunyai *masalah* akan dinyatakan sebagai kebutuhan. Keinginan dalam ekonomi konvensional ditentukan oleh konsep nilai guna sementara kebutuhan dalam Islam ditentukan oleh konsep *masalah*.

Sedangkan studi empirik mengenai kesejahteraan diteliti oleh Choudhury (1991) yang melihat kriteria kesejahteraan akan bekerja dalam kondisi untuk memilih di antara proyek-proyek investasi yang berbeda untuk mengalokasikan sumberdaya dengan dasar Syariah secara Islam. Memanglah, sebagian besar kriteria ini tumpang tindih satu dengan yang lainnya. Meskipun, kriteria yang disebutkan tersebut merupakan kriteria yang hanya indikatif, tetapi tidak yang mendalam. Kriteria kesejahteraan tersebut, antara lain peningkatan ideologi, efisien penggunaan sumberdaya, keadilan dalam distribusi pendapatan, baik secara kolektif, prioritas terhadap kebutuhan yang mendesak, stabilitas, kepastian, keberlangsungan, produktivitas, pertimbangan manusia, universal, etika dan moral.

Sikap dan perilaku individu dalam suatu organisasi perusahaan atau kelompok kerja termasuk di lembaga pendidikan seperti universitas, akademi atau sekolah tinggi merupakan fenomena yang sangat kompleks. Sikap dan perilaku baik individual ataupun kelompok merepresentasikan perasaan terhadap lingkungan pekerjaan yang dapat berwujud pada kinerja, keadilan dan kesejahteraan bagi individu atau kelompok yang terlibat di dalamnya. Kinerja sebuah lembaga pendidikan dan kesejahteraan karyawan, secara alamiah tidak sepenuhnya

bersifat independen dalam melakukan pencapaian tujuan, melainkan dapat terbentuk melalui intervensi dari lingkungan kerjanya. Telaah literatur memberikan petunjuk bahwa kepemimpinan dan keadilan distributif merupakan 2 (dua) faktor penting yang mendorong terciptanya kinerja lembaga, dan kesejahteraan karyawan. Studi ini dilandasi keinginan untuk memahami pengaruh dari kualitas kepemimpinan dan keadilan distributif yang bernuansa Islami terhadap kinerja lembaga, dan kesejahteraan karyawan yang menggunakan pendekatan nilai-nilai Islam (syariah) dalam menjalankan kegiatannya.

Telaah literatur memperlihatkan bahwa pengaruh kualitas kepemimpinan dan keadilan distributif terhadap kinerja lembaga, dan kesejahteraan karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung akan saling memengaruhi.

Kepemimpinan dan keadilan distributif berperan menggerakkan dan mendorong lembaga tersebut untuk mencapai kinerja yang lebih baik, melalui proses transformasi kualitas pemimpin dan adanya keadilan distributif lembaga yang Islami, sehingga kinerja lembaga bisa lebih baik, dan kesejahteraan karyawan dapat tercapai dengan maksimal..

Sejalan dengan itu, dalam beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas kepemimpinan berkorelasi secara positif terhadap peningkatan kinerja sebuah organisasi, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan dalam organisasi yang bersangkutan. Demikian pula halnya bahwa keadilan distributif mengandung unsur keislaman dalam setiap

proses yang terjadi sehingga dengan nafas Islam dalam konsepnya yang menjunjung tinggi semangat kepemimpinan Islam tadi seperti kejujuran, amanah, fathona, dan tabliq, kemudian menyatu dalam konsep keadilan distributif yang seimbang, tenaga kerja, modal dan megedepankan zakat sehingga pada akhirnya akan memicu peningkatan kinerja perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan karyawan yang terlibat manajemen tersebut.

6.2 Kepemimpinan Islami terhadap Keadilan Distributif dan Tinjauannya dalam Pandangan Al-Qur'an dan As-Sunnah

Dalam pandangan Islam, prinsip Islam tentang kebijakan fiskal, anggaran pendapatan dan belanja bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal dianggap sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi perilaku manusia yang dapat dipengaruhi melalui insentif atau disinsentif yang disediakan dengan meningkatkan pemasukan pemerintah. Jadi, kebijakan fiskal Islami adalah suatu kebijakan yang mengatur pengeluaran, dan penerimaan pemerintah yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan.

Al Qur'an juga telah menetapkan suatu kebijakan pengeluaran yang luas untuk distribusi kekayaan berimbang di antara berbagai lapisan masyarakat. Bukannya mengakumulasi kekayaan, namun Islam menganjurkan

untuk lebih banyak melakukan pengeluaran. Seperti pada Q.S, Al Baqarah(2):219.

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَدَسَّأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya : “mereka bertanya kepadamu tentang khamar [136] dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". **dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan."** Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,

[136] Segala minuman yang memabukkan.

Namun bukan berarti mengeluarkan uang untuk hal-hal yang tidak perlu, Islam juga mengutuk pemborosan. Selain itu penimbunan juga dikutuk karena dengan demikian kekayaan tidak dapat beredar dan manfaat penggunaannya tidak dapat dinikmati si pemakai ataupun masyarakat.

Dalam pandangan Islam, pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja (APB) sebuah organisasi sebagai bagian dari aktivitas ekonomi ummat, dirancang dan disusun untuk mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan manusia, bukan untuk kesejahteraan

individu-individu tertentu, seperti hanya kepentingan pimpinan saja atau kepentingan individu-individu yang tidak terikat dengan norma dan etika Islam. Tetapi ekonomi dalam perspektif Islam, diperuntukkan bagi seluruh manusia dan masyarakat, bukan individu dan kelompok masyarakat tertentu. Islam tidak memisahkan antara apa yang wajib ada bagi masyarakat dengan upaya mewujudkan kesejahteraan manusia, bahkan menjadikan dua hal tersebut saling berhubungan dan berkaitan satu dengan yang lain. Islam memperhatikan kepentingan individu dan masyarakat secara bersamaan. Ketika Islam mengatur masalah masyarakat, ia juga memperhatikan kepentingan-kepentingan individu. Sebaliknya, ketika Islam mengatur kepentingan individu, ia juga memperhatikan pula kepentingan masyarakat. Hal inilah yang mendorong seorang pemimpin untuk melakukan penyusunan dan penetapan pengelolaan APB secara Islami.

Atas dasar ini, falsafah ekonomi Islam selalu dikaitkan dengan perintah dan larangan-larangan Allah, yakni dengan menghubungkan gagasan-gagasan yang menjadi dasar untuk mengatur individu dan masyarakat, serta menjadikan perilaku-perilaku ekonomi sesuai hukum Islam. Hukum syara' adalah bingkai dan koridor yang mengatur seluruh perilaku ekonomi kaum muslim.

Adapun mengenai azas ekonomi Islam, sesungguhnya Islam telah menetapkan bahwa masalah mendasar adalah bagaimana setiap individu bisa mendapatkan alat pemuas kebutuhan, yakni bagaimana mendapatkan kekayaan, bagaimana cara mengembangkan kekayaan dan bagaimana cara mendistribusikan kekayaan. Kesemuanya

harus tergambar dengan jelas dalam pengelolaan APB perusahaan.

Dari sini bisa disimpulkan bahwa kepemimpinan Islam sangat menentukan pengelolaan APB sebuah perusahaan atau perguruan tinggi Islam. Kualitas pengelolaan APB sangat ditentukan oleh kualitas seorang pimpinan, termasuk di dalamnya kesesuaian pengelolaan APB dengan dasar, falsafah dan azas Islam.

Kepemimpinan Islami dilihat dari indikator istiqamah adalah sikap konsisten yang dijalankan manajemen perusahaan islami dalam melaksanakan distribusi pendapatan kepada karyawan melalui kebijakan dan peraturan yang ditetapkan. Sikap amanah juga ditunjukkan oleh kepemimpinan Islam dalam mendistribusikan pendapatan yang dituangkan dalam bentuk peraturan dan mekanisme yang disebut dengan standar operasional dan prosedur (SoP) di masing-masing perusahaan atau perguruan tinggi Islam. Adapun sikap terbuka dari kepemimpinan Islami adalah di dalam mendistribusikan pendapatan untuk keperluan karyawan, infrastruktur dan simpanan yang disosialisasikan kepada semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) sehingga mereka mengetahui kebijakan berkaitan dengan distribusi pendapatan. Sikap visioner juga ditunjukkan kepemimpinan Islam dengan mengembangkan kebijakan yang berkaitan dengan distribusi pendapatan sehingga mencapai suatu harapan semua pihak dan mampu mengayomi dan melindungi setiap pemangku kepentingan di unit bisnis Islam menuju kesejahteraan dan kualitas pengelolaan perusahaan yang mapan dan sempurna.

Kepemimpinan Islam secara mutlak adalah bersumber dari Allah swt., yg telah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini sehingga dimensi kontrol tidak terbatas pada interaksi antara yang memimpin (*'umara*) dengan yang dipimpin. Kedua-duanya harus mempertanggungjawabkan amanah yang diembannya sebagai seorang khalifah di muka bumi secara komprehensif.

Pendekatan berdasarkan al-Qur'an dan al-hadist yang mengandung 4 prinsip pokok dalam kepemimpinan yaitu: tanggung jawab dalam organisasi, prinsip etika tauhid, prinsip keadilan, dan prinsip kesederhanaan. Islam memerintahkan keadilan dalam seluruh persoalan yang berhubungan dengan masyarakat manusia, karena akan berujung pada peningkatan kesejahteraan karyawan. Persepsi keadilan distributif menunjuk pada penilaian tentang keadilan hasil yang diterima oleh individu. Penemuan-penemuan penelitian menjelaskan bahwa keadilan distributif berhubungan dengan persepsi individu atas hubungannya dengan individu lain yang memiliki sumber daya (Marshall et al., 2001).

Folger dan Cropanzano dalam Harris (2002) mengamati bahwa sikap adil berkembang “untuk membantu meningkatkan perilaku anggota organisasi untuk bekerja melebihi kewajiban kerja formalnya”. Keadilan distributif merupakan suatu anggapan mengenai keadilan hasil oleh organisasi dalam hubungannya dengan individu atau input kelompok, dan keadilan ini didominasi oleh teori kesamaan (Adams dalam Thornhill dan Saunders, 2003), khususnya dalam hal bagaimana individu mengevaluasi dan bereaksi terhadap perlakuan yang berbeda.

Kajian tentang distribusi pendapatan sangat erat kaitannya dengan hak-hak individu dalam masyarakat. Distribusi pendapatan merupakan bagian penting dalam membentuk kesejahteraan suatu komunitas. Secara umum asas kebijakan ekonomi dalam Islam adalah menyangkut distribusi kekayaan. Distribusi kekayaan harus dilihat sebagai bagian dari pilihan pribadi, bagian dari keputusan ekonomi mikro seseorang, bukan peningkatan kekayaan sebagaimana yang ditempuh oleh ekonomi konvensional, karena itu persoalan distribusi adalah tujuan tertinggi dari segala aktivitas ekonomi Islam.

Jumhur ulama berpendapat bahwa jika pola perilaku sosial dan perekonomian disusun menurut ajaran-ajaran Islam, maka tidak ada kesenjangan kekayaan yang ekstrim dalam suatu masyarakat. Keyakinan ini didasarkan atas argumentasi bahwa seluruh sumberdaya bukan saja karunia dari Allah swt., bagi semua manusia,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ

فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾

Artinya : Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.” QS Al-Baqarah (2) : 29

Melainkan juga sebagai suatu *amanah*,

ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَحْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ ءَامِنُوا

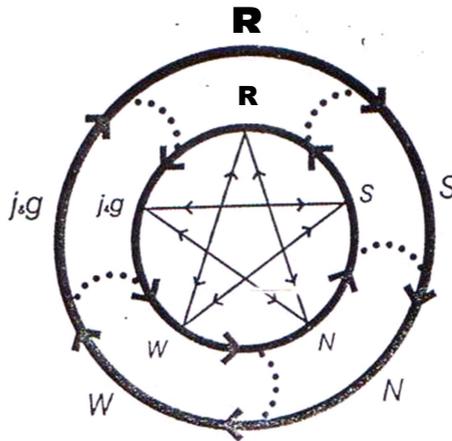
مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٥٧﴾

Artinya : berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya[1456]. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. QS Al-Hadiid (57) : 7

[1456] Yang dimaksud dengan menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. karena itu tidaklah boleh kikir dan boros.

yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Amanah itu adalah memanfaatkan anugerah Allah dengan adil tanpa pengecualian siapapun. Tidak untuk memperkaya diri, mengisap orang, atau memperbudak orang lain.

Ibnu Khaldun dalam teori Dynamic Model dapat memberikan kontribusi pada kepemimpinan terhadap keadilan distributif dengan teori dynamic model reformasi pembangunan masyarakat madani yang diturunkan menjadi semi macro model kepemimpinan Islam terhadap keadilan distributif seperti terlihat pada Gambar 6.1



Gambar 6.1. Semi Macro Model yang diturunkan dari Dynamic Model : Reformasi Pembangunan Masyarakat Madani Ibnu Khaldun (Ahmadi Thaha, 2000)

Dari Dynamic Model Ibnu Khaldun dalam studi ini ini diturunkan dan ditemukan menjadi semi macro model seperti pada Gambar 5.2., dimana simbol G (*Government*) diganti dengan R (*BoR = Board of Rector*), S = *Syariah of Islamic Higher Education*, N = *Number of Islamic Higher Education*, W = *welfare of employee Islamic Higher Education*, j = *justice*, g = *growth*. Seorang Direktur atau rektor (R) selaku pimpinan di perusahaan atau di perguruan tinggi Islam dengan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki akan menjadi pemimpin yang baik ketika dia menjalankan seluruh aturan dan kebijakan yang berdasarkan syariah Islam (S) yang ditujukan kepada karyawan atau warga civitas (N), maka kesejahteraan (W) karyawan akan tercapai penerapan keadilan distributif (j) dan selanjutnya terjadi pertumbuhan (g) Perusahaan atau perguruan tinggi Islam.

6.3 Kepemimpinan Islami terhadap Kesejahteraan Karyawan dan Tinjauannya dalam Pandangan Al-Qur'an dan As-Sunnah

Dalam pandangan Islam, sebagaimana yang dijelaskan oleh Chapra, dalam Abidin, 2000. Kesejahteraan didasarkan atas konsep-konsep Islam tentang kebahagiaan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik yang sangat menekankan aspek persaudaraan, keadilan sosio ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spiritual umat manusia. Hal ini disebabkan karena umat manusia memiliki kedudukan yang sama sebagai Khalifah Allah di muka bumi dan sekaligus sebagai hamba-Nya yang tidak akan dapat merasakan kebahagiaan dan ketenangan batin kecuali jika kebahagiaan sejati telah dicapai melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan materiil dan spiritual.

Dengan demikian, kesejahteraan seorang karyawan di perusahaan, sangat ditentukan oleh sejauhmana kebutuhan-kebutuhan materiil maupun spiriualnya dipenuhi. Tentu hal ini harus menjadi perhatian. Sehingga semakin tinggi kepedulian seorang pemimpin, maka semakin tinggi pula kesejahteraan yang akan dinikmati oleh karyawan. Sebagaiman yang disebutkan sebelumnya bahwa ketika seorang pemimpin memiliki kualitas yang baik, maka akan menyusun dan menetapkan pengelolaan APB yang baik pula, sehingga tentunya akan berkorelasi pula terhadap kesejahteraan karyawan.

Dalam mencapai tujuan tersebut, pemimpin haruslah memiliki sifat yang amanah atas tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya guna menciptakan suasana

dan kondisi yang dapat menyenangkan dan mensejahterakan karyawannya.

Hal ini tentu senada dengan firman Allah SWT di dalam Al-Qur'an Surah Al-Nisa (4) ayat 58 yang berbunyi :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (QS. An-Nisaa (4) : 58).

Begitupula halnya dalam memperlakukan karyawan. Pemimpin harus memiliki sifat yang shiddiq dan adil, karena kejujuran, kebenaran dan keadilan seorang pemimpin dalam pandangan Islam akan sangat menentukan kenyamanan dan kesejahteraan karyawan, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa (4) ayat 8, yang berbunyi sebagai berikut :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
 شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ
 اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Maidah (5) : 8).

﴿٨﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ اَنْفُسِكُمْ اَوْ
 الْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۗ اِنَّ يَكُوْنُ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهٖمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا
 اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ تَلَوْا اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا



Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri, ibu-bapak, dan kau kerabatmu. Apakah ia kaya

atau miskin, karena Allah akan melindungi.....
"(QS. An-Nisaa (4) : 135).

Selain itu, pemimpin dalam mensejahterakan karyawannya harus memenuhi sepuluh *muwashofat* (karakter) sebagai berikut :

Pertama, *salimul aqidah* (bersih akidahnya)

Seorang pemimpin harus memiliki keimanan yang kokoh, bersih dari sifat-sifat syirik, dan menghukum dengan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Kebersihan aqidah ditandai dengan keimanan yang kokoh terhadap rukun iman dan keyakinan kepada Tauhidulloh. Selalu mengikhlaskan niat dalam setiap tindak tanduknya.

❦ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى
حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya : “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.(QS. al Baqarah (2) : 177)

﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ
وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾



Artinya : sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh[294], dan teman sejawat, Ibnu sabil[295] dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak

menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri (QS. An-Nisaa : 36)

[294] Dekat dan jauh di sini ada yang mengartikan dengan tempat, hubungan kekeluargaan, dan ada pula antara yang Muslim dan yang bukan Muslim.

[295] Ibnus sabil ialah orang yang dalam perjalanan yang bukan ma'shiat yang kehabisan bekal. Termasuk juga anak yang tidak diketahui ibu bapaknya.

Kedua, shahihul ibadah (benar ibadahnya)

Seorang pemimpin harus menjalankan hidup dalam rangka ibadah, baik secara khusus maupun umum. Dia harus mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di Bulan Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Karena dia wajib menjalankan kepemimpinannya sebagai bagian dari pengabdian, ketundukan, dan ketaatannya kepada Allah Ta'ala, sehingga ia menjalankan kepemimpinan tersebut dengan ikhlas dan ihsan (professional), sebagaimana sabda Rosululloh Shollailahu Alaihi Wa Sallam “*Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan terhadap semua urusan.*”

رَّبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ۗ هَلْ تَعْلَمُ

لَهُ سَمِيًّا ﴿٥٠﴾

Artinya : *Tuhan (yang menguasai) langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya, Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam*

beribadat kepada-Nya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia (yang patut disembah)? (QS. Maryam (19) :65)

Ketiga, *matinul khuluq* (kokoh akhlaknya)

Seorang pemimpin harus jujur (*shiddiq*) dan menjadi *qudwah* atau contoh yang baik bagi rakyatnya. Dari segi moralitas dia menjalankan kepemimpinan dengan penuh amanah, adil, hikmah, empati, tidak mengancam, menindas, dan menyakiti hati rakyat. Jangan jadi pemimpin ummat jika masih suka bermaksiat baik secara sembunyi-sembunyi apalagi terang-terangan.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ

وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya : *Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah. (QS. Al ahzab (33) : 21)*

Keempat, *qadirun 'alal kasbi* (mandiri dan produktif)

Seorang pemimpin harus kompeten, mampu menunjukkan kreativitas dan potensi yang dimilikinya. Kalau pekerjaan kecil saja membutuhkan inovasi dan dinamisasi, apalagi pekerjaan memimpin negara. Seharusnya dia

memiliki inisiatif mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya dengan program-program ekonomi yang tepat.

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا
بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾

Artinya : “(siksaan) yang demikian itu adalah karena Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan meubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum, hingga kaum itu meubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri[621], dan Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. Al Anfaal (8) : 53.)

[621] Allah tidak mencabut nikmat yang telah dilimpahkan-Nya kepada sesuatu kaum, selama kaum itu tetap taat dan bersyukur kepada Allah.

Kelima, *mutsaqaful fikri* (luas pemikirannya)

Seorang pemimpin harus cerdas (*fathonah*), visioner memiliki wawasan yang luas, yang mencakup pengetahuan tentang administrasi negara. politik, hukum, dan agama. sehingga membuatnya mampu berijtihad terhadap kasus-kasus dan hukum-hukum. Dengan karakter *mutsaqaful fikri* ini juga seorang pemimpin harus komunikatif (*tabligh*), mampu menyampaikan ide dan gagasannya dapat difahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Keenam, *qowiyul jismi* (kuat fisiknya)

Seorang pemimpin dituntut memiliki fisik yang kuat tidak lamban, loyo, atau mudah ngantuk. Adalah kebiasaan Rasulullah Shollallahu Alaihi Wa Sallam jika beliau ingin mengangkat seseorang menjadi panglima perang, maka disuruhnya orang tersebut menjadi imam sholat dan melakukan khutbah. Karenanya tatkala Rasul Shollallahu Alaihi Wa Sallam menyuruh Abu Bakar tampil menjadi imam, maka kaum muslimin mengangkatnya pula sebagai pemimpin perang. Imam sholat menunjukkan adanya jaminan moral, sedangkan pemimpin perang menunjukkan jaminan kekuatan fisik, keberanian dan ketegasan. Maka seorang pemimpin harus tegas dan berani menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar.

Ketujuh, *mujahidun linafsihi* (bersungguh-sungguh mengendalikan dirinya)

Seorang pemimpin harus bersungguh

-sungguh dan mampu mengendalikan hawa nafsunya, tidak otoriter, arogan, dan memaksakan kehendak kepada orang lain. Dia harus menjauhi sifat pemaarah atau sifat egois (mementingkan diri sendiri), selalu harus tertanam dalam dirinya bahwa ia merupakan "*khodimul ummah*" (pelayan ummat).

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ۖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ ﴿٥١﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ

الْمَأْوَىٰ ﴿٥٢﴾

Artinya : “dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka Sesungguhnya syurgalah tempat tinggal(nya). (QS. an Naaziat (79) : 40-41)

Kedelapan, *munazhamun fi syu’unihi* (mampu menata semua urusannya)

Seorang pemimpin harus mampu mengatur semua urusannya dengan baik, mampu mengelola potensi anggota atau bawahannya, serta mampu bermusyawarah dengan baik. Pemimpin yang tidak mampu mengurus (*memanage*) akan menimbulkan kekacauan.

Nabi Muhammad SAW dalam salah satu hadist yang sudah sangat sering kita dengar mengatakan bahwa, "Jika suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya (tidak memiliki kapasitas untuk mengembannya), maka tunggulah saat kehancurannya" (H. R. Bukhari bab Ilmu).

Kesembilan, *haritsun ‘ala waqtihi* (mampu memelihara waktunya)

Seorang pemimpin harus mampu memelihara waktunya dengan efektif dan efisien, tidak lalai dan melakukan perbuatan yang mubazir. Pemimpin memberikan waktunya untuk kepentingan ummat dan bangsanya meskipun juga perlu menjaga keseimbangan waktu untuk diri dan keluarganya. Pemimpin yang sholeh dan efektif digambarkan Rasulullah Shollallohu Alaihi Wa Sallam

sebagai “*ruhbanun bil lail wa fursanun bin nahar*”, seperti rahib di malam hari dan seperti penunggang kuda di siang hari.

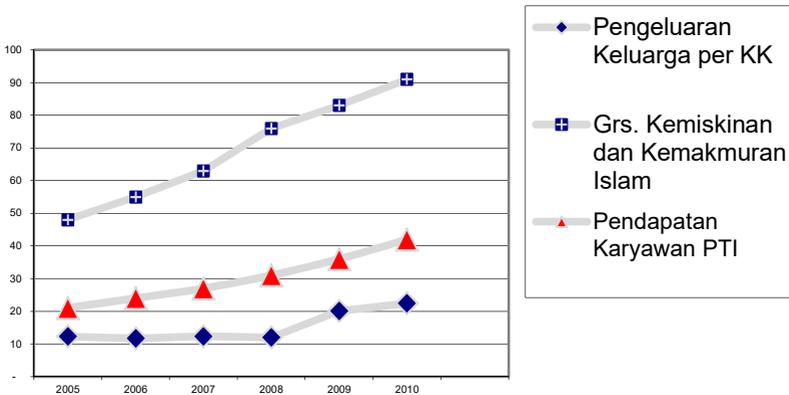
Kesepuluh, *nafi'un lighairihi* (bermanfaat bagi orang lain)

Seorang pemimpin tidak boleh egois dan harus mementingkan kemaslahatan umat dan rakyat di atas kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok, sehingga ia dicintai oleh rakyatnya. Dalam satu hadist Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda : “sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain.” Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam juga menjelaskan bahwa salah satu kriteria pemimpin yang baik yaitu : “kalian mencintai mereka (pemimpin), dan merekapun mencintai kalian. Kalian mendo’akan mereka dan mereka pun mendo’akan kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah mereka yang membenci kalian dan kalian pun membenci mereka, kamu melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian“. (HR Thabrani).

Bila sifat-sifat tersebut dimiliki oleh seorang pemimpin, maka sejalan dengan hasil penelitian ini, maka pemimpin akan memiliki peran yang sangat penting dalam mensejahterakan karyawannya. Imam Ibnu Taimiyah menyatakan, bahwa fungsi jabatan apapun di dalam Islam bertujuan untuk amar ma’ruf nahi munkar. Hal ini berlaku untuk jabatan tertinggi dan jabatan tinggi negara, seperti presiden, panglima perang, kepala kepolisian, direktur bank dan lain sebagainya, sampai jabatan terendah seperti

pimpinan rombongan dalam sebuah perjalanan. (al Hisbah: 8-14).

Di hadist lain disebutkan, bahwa sesungguhnya jabatan ini adalah amanah dan sesungguhnya di akhirat akan menyebabkan kekecewaan dan penyesalan, kecuali bagi yang berhak menerimanya dan mampu menunaikan tugas sebagaimana mestinya” (HR. Muslim, no:1826). Menurut jumhur (mayoritas) ulama dari berbagai mazhab Islam, bahwa memilih pemimpin atau mengangkat pejabat untuk suatu jabatan tertentu demi kemaslahatan kaum muslimin, hukumnya adalah wajib (al Imamah, al Aamidy: 70-71). Karena keberadaan seorang pemimpin, dalam pandangan Islam, berfungsi untuk menegakkan agama Allah serta untuk menyiasati dan mengatur urusan duniawi masyarakat dengan mengacu kepada agama (Muqadimah Ibnu Khaldun: 211). Oleh karenanya, wajib memberikan dukungan kepada calon pemimpin yang shaleh yang memiliki visi dan misi dakwah rahmatan lil-‘alamin, agar ia mendapatkan kekuatan secara konstitusional sebagai pemimpin. Jika tidak, maka bakal diperintah oleh sekelompok orang yang tak segan-segan menyengsarakan umat dan bangsa ini ke depan.



Gambar 6.2. Garis Kemiskinan dan Kemakmuran dalam Islam

Sumber : Zadjuli (2007), Data BPS (2011) disusun dan diolah kembali

Garis kemakmuran *muzaqqi* / garis kemiskinan *mustahiq* antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 ternyata posisinya masih jauh lebih tinggi dari rata-rata gaji karyawan di Propinsi Sulawesi Selatan. Dengan perkataan lain karyawan di Propinsi Sulawesi Selatan masih termasuk dalam golongan *mustahiq*. Dengan demikian masalah gaji karyawan ini jauh dari rasa keadilan dalam Islam. Keadaan/kondisi karyawan tersebut adalah sangat terpaksa karena tidak ada pekerjaan lain. Jadi persepsi studi yang menyatakan bahwa keadilan distributif tidak berpengaruh secara signifikan pada kesejahteraan karyawan adalah benar. Teori tentang garis kemakmuran *muzaqi* dan garis kemiskinan *mustahiq* menurut Zadjuli (2007) ternyata dapat dipakai sebagai tolok ukur pada masyarakat muslim Propinsi Sulawesi Selatan (lihat Gambar 5.3)

6.4 Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) terhadap Keadilan Distributif dan Tinjauannya dalam Pandangan Al-Qur'an dan As-Sunnah

Memperhatikan bahaya pendistribusian harta yang bukan pada haknya dan terjadinya penyelewengan distribusi pada jalannya yang benar, sebagaimana yang ditetapkan dalam pengelolaan APB, maka Islam mengutamakan keadilan distributif dengan perhatian besar yang nampak dalam beberapa fenomena, dimana yang terpenting adalah sebagai berikut :

- 1) Banyaknya nash Al Quran dan hadist Nabawi yang mencakup tema distribusi dengan menjelaskan sistem manajemennya, himbauan komitmen dan cara-caranya yang terbaik dan memperingatkan penyimpangan dari sistem yang benar.
- 2) Syariat Islam tidak hanya menetapkan prinsip-prinsip umum bagi distribusi dan pengembalian distribusi, namun juga merincikan dengan jelas dan lugas cara pendistribusian harta dan sumber-sumbernya.
- 3) Banyaknya dan komperhensifnya sistem dan cara distribusi yang ditegakkan dalam Islam, baik dengan cara pengharusan (wajib) maupun yang secara suka rela (sunnah)
- 4) Al Qur'an menyebutkan secara tekstual dan eksplisit tentang tujuan peringatan perbedaan di dalam kekayaan, dan mengantisipasi pemusatan harta dalam kalangan minoritas.

Hal ini dapat kita lihat pada Firman Allah QS Al-Hasyr (59) ayat 7.

أَفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولٍ ۖ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
مِنْكُمْ ۗ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya : “ Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”

- 5) Dalam fikih ekonomi Umar Radhiyallahu Anhu, tema distribusi mendapat porsi besar yang dijelaskan dalam kepemimpinannya, yakni dalam perkataannya, “ Sesungguhnya aku telah meninggalkan kepada kalian dua hal yang akan selalu kalian dalam kebaikan selama kalian komitmen kepada keduanya, yaitu adil dalam hukum, dan adil dalam pendistribusian.”

Pengelolaan APB sangat berperan dalam mencapai tujuan keadilan distributif, paling tidak ada empat tujuan yang bisa kita lihat sebagai berikut :

Pertama : Tujuan Dakwah

Yang dimaksud dakwah disini adalah mendakwahkan Islam melalui aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang paling jelas adalah bagaimana sumber-sumber penerimaan dalam pengelolaan APB didistribusikan secara adil kepada pengguna anggaran dalam masyarakat sekalipun di dalam lingkungan ada kelompok non muslim, sebagaimana pembagian zakat kepada 8 ashnaf. Dimana muallaf sebagai salah satu penerima zakat itu adakalanya orang kafir yang diharapkan kelslamannya atau dicegah keburukannya, atau orang Islam yang di harapkan kuat kelslamannya. Sebagaimana sistem distributif dalam *ghanimah* dan *fa'i* juga memiliki tujuan dakwah yang jelas.

Pada sisi lain, bahwa pemberian zakat kepada muallaf juga memiliki dampak dakwah terhadap orang yang menunaikan zakat itu sendiri.

Sebab Allah berfirman pada Firman Allah QS Ali Imran: 140

إِن يَمَسُّكُمْ فَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ فَرْحٌ مِّثْلُهُ ۗ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نَدَاوِلُهَا بَيْنَ
النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ ﴿١٤٠﴾

Artinya : “Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, Maka Sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada perang Badar) mendapat luka yang serupa. dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu kami pergilirkan diantara manusia (agar mereka mendapat pelajaran); dan supaya Allah

membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada' dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim,”

Kedua : Tujuan Pendidikan

Pengelolaan APB sebagai media dalam keadilan distributif dapat pula dijadikan sebagai tujuan pendidikan. Di antara tujuan pendidikan dalam distribusi adalah seperti yang di sebutkan dalam firman Allah QS At-Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya : *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan[658] dan mensucikan[659] mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

[658]Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda

[659]Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Secara umum, bahwa distribusi dalam perspektif ekonomi Islam dapat mewujudkan beberapa tujuan

pendidikan, dimana yang terpenting adalah sebagai berikut :

- a) Pendidikan terhadap akhlak terpuji, seperti suka memberi, berderma dan mengutamakan orang lain.
- b) Mensucikan dari akhlak tercela, seperti kikir, loba dan mementingkan diri sendiri (egois).

Ketiga : Tujuan Sosial

Tujuan sosial terpenting yang dapat kita lihat dalam peran APB terhadap keadilan distributif adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi kebutuhan karyawan sebagai kelompok yang membutuhkan, dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim. Dapat di lihat pada Firman Allah QS Al Baqarah:273

لِّلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَارَبَّ اللَّهُ بِهِ عَالِمٌ



Artinya : “(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya Karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu

nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”

2. Memperkuat ikatan cinta dan kasih sayang antara individu dan kelompok di dalam masyarakat, ikatan antara pimpinan dan karyawan, karyawan dengan karyawan dan sebagainya.
3. Mengikis sebab-sebab kebencian dalam lingkungan perusahaan, dimana akan berdampak pada terrealisasinya keamanan dan ketenteraman kampus dan masyarakat, sebagai contoh bahwa distribusi yang tidak adil dalam penerimaan gaji dalam perusahaan akan berdampak adanya kelompok dan dikotomi dalam perusahaan tersebut, dan bertambahnya tingkat kriminalitas yang berdampak pada ketidak tenteraman.
4. Keadilan dalam distributif mencakup ;
 - a) Pendistribusian sumber –sumber penghasilan
 - b) Pendistribusian pemasukan unit-unit usaha.
 - c) Pendistribusian diantara masyarakat kampus, dan keadilan dalam pendistribusian jabatan, tugas dan tanggung jawab dalam perusahaan.

Keempat : Tujuan Ekonomi

Keterkaitan antara pengelolaan APB dan keadilan distributif dapat dilihat dalam tujuan ekonominya dimana yang terpenting diantaranya dapat disebutkan seperti berikut ini :

1. Pengembangan harta, karena pengelolaan APB menentukan sumber-sumber penerimaannya, kemudian mendistribusikan kepada karyawan dalam bentuk gaji dan upah, sehingga seluruh karyawan merasa terpenuhi

kesejahteraannya dan bekerja secara maksimal, yang pada gilirannya akan mendatangkan lagi penghasilan yang lebih besar dan menyebabkan pengembangan harta yang lebih besar lagi.

2. Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhi kebutuhan harta atau persiapan yang lazim untuk melaksanakannya dengan melakukan kegiatan ekonomi. Pada sisi lain, bahwa sistem distributif dalam ekonomi Islam dapat menghilangkan faktor – faktor yang menghambat seseorang dari andil dalam kegiatan ekonomi ; seperti utang yang membebani pundak orang – orang yang berhutang atau hamba sahaya yang terikat untuk merdeka. Karena itu Allah menjadikan dalam zakat bagian bagi orang-orang yang berhutang dan bagian bagi hamba sahaya.
3. Andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, di mana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi. Sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya di antara individu masyarakat. Karena itu kajian tentang cara distribusi yang dapat merealisasikan tingkat kesejahteraan ekonomi terbaik bagi umat adalah suatu keharusan dan keniscayaan.

Dapat kita lihat pada QS Al-Baqarah : 265

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ
 كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَفَاتَتْ أَكْلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا
 وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya Karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran Tinggi yang disiram oleh hujan lebat, Maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. jika hujan lebat tidak menyiraminya, Maka hujan gerimis (pun memadai). dan Allah Maha melihat apa yang kamu perbuat.”

Penerapan kepemimpinan Islami berpengaruh terhadap keadilan distributif. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin yang menerapkan nilai-nilai Islami akan berbuat lebih adil karena Islam memerintahkan keadilan dalam seluruh persoalan yang berhubungan dengan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan termasuk kesejahteraan karyawan.

Penerapan kepemimpinan Islami berpengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan karyawan. Hasil ini tidak serta merta dapat diinterpretasi bahwa kepemimpinan Islami tidak berpengaruh penting terhadap kesejahteraan karyawan, akan tetapi pengaruh tersebut terjadi melalui suatu proses terbangunnya pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja (APB) yang baik dan terciptanya keadilan distributif pada perguruan tinggi Islam. Hal ini didukung oleh bukti bahwa keadilan distributif dan pengelolaan APB secara langsung berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan karyawan.

Keadilan distributif tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan karyawan. Hal ini berarti persepsi karyawan terhadap keadilan distributif belum terlaksana baik karena masih terdapat perlakuan yang tidak adil dalam pengalokasian sejumlah anggaran, kenyataannya alokasi anggaran lebih banyak ditujukan untuk pembenahan infrastruktur, tunjangan pimpinan dan simpanan perguruan tinggi Islam, sedikit yang disisakan untuk kesejahteraan karyawan dalam bentuk gaji dan tunjangan lainnya.

Dalam pandangan Islam, pengelolaan APB sebuah organisasi sebagai bagian dari aktivitas ekonomi umat, dirancang dan disusun untuk mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan manusia, bukan untuk kesejahteraan individu-individu tertentu, seperti hanya kepentingan pimpinan saja atau kepentingan individu-individu yang tidak terikat dengan norma dan etika Islam. Pimpinan perguruan tinggi Islam sangat menentukan pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja (APB) perguruan tinggi. Kualitas pengelolaan APB sangat ditentukan oleh kualitas seorang pimpinan, termasuk di dalamnya kesesuaian pengelolaan APB dengan dasar, falsafah dan azas Islam. Islam memerintahkan keadilan dalam seluruh persoalan yang berhubungan dengan masyarakat, karena akan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk karyawan. Persepsi keadilan distributif menunjukkan pada penilaian tentang keadilan yang diterima oleh individu. Kepemimpinan Islam secara mutlak adalah bersumber dari Allah SWT., yg telah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini sehingga dimensi kontrol tidak terbatas pada interaksi antara yang memimpin ('umara) dengan yang dipimpin. Kedua-duanya harus mempertanggungjawabkan amanah yang diembannya sebagai seorang khalifah di muka bumi secara komprehensif.

Kesejahteraan karyawan -sangat ditentukan oleh sejauhmana pimpinan perguruan tinggi Islam memenuhi kebutuhan-kebutuhan materil maupun spiritual karyawan. Sehingga semakin tinggi kepedulian seorang pemimpin, maka semakin tinggi pula kesejahteraan yang akan dinikmati oleh karyawan. Pemimpin perguruan tinggi Islam

dalam mensejahterakan karyawannya harus memenuhi sepuluh karakter (muwashofat) yakni : 1) salimul aqidah (bersih akidahnya), 2) shahihul ibadah (benar ibadahnya), 3. matinul khuluq (kokoh akhlaknya), 4) qadirun 'alal kasbi (mandiri dan produktif), 5) mutsaqaful fikri (luas pemikirannya), 6) qowiyul jismi (kuat fisiknya), 7) mujahidun linafsihi (bersungguh-sungguh mengendalikan dirinya), 8) munazhamun fi syu'unihi (mampu menata semua urusannya), 9) haritsun 'ala waqtihi (mampu memelihara waktunya), dan 10) nafi'un lighairihi (bermanfaat bagi orang lain)

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Jabbar, Qadi, 1965. *Al-Mugni fi Abwah at-Tauhid wa al-'Adl*, Kairo, Daral al-Misriyah, hlm. 44.
- Al Bayan, 2008. *Shahih Bukhari Muslim*. Bandung : Jabal Munawwir, Ahmad Warson. Al-Munawwir
- Allen S G 1995. *Updated Notes on The Interindustry Wage Structure 1890 – 1990 Industrial and Labor Relations Review* Vol 48 No2: 305 – 321
- Al-Qayim, Al-Juziyah ibn, 1961. *At-Turuqu al-Hukmiah fi siyasat asy-Syar'iyat*, Munassat al'Arabiyat li at-Tab'l wa an-Nasyr, al-Qahirat,
- Anonim, 1992. *Ensiklopedi Islam Indonesia*, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: Djambatan, hlm. 969
- Antonio, Muhammad Safi'i, 2000. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Bank Indonesia, Jakarta
- Arikunto, S. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. PT. Rineka. Cipta. Jakarta. Budi Santoso, Purbayu. 2005.
- Batinggi, Ahmad, 1999. *Manajerial Pelayanan Umum*. Universitas Terbuka, Jakarta
- Beekun, Rafik dan Badawi, Jamil . 1999. *The Leadership Process in Islam*. Article partly based on the book Leadership: An Islamic Perspective
- Berry, Leonard L. & A. Parasuraman, 1991, *Marketing Service, Competing Through Quality*, New York : the Free Press
- Carbonell, AF., 2002. *Subjective Questions to Measure Welfare and Well-Being*. Discussion paper. Tinbergen Institute. Amsterdam.
- Cooper, Donald R., and Emory C., William. 1997. *Metode Penelitian Bisnis*. 5th Ed. Erlangga.Jakarta
- Chapra, M. Umar. 2000. *Islam dan Tantangan Ekonomi* , terj. Ikhwan Abidin, Jakarta : Gema Insani Press
- Choudhury, MA., 1991. *Social Choice in an Islamic Economic Framework*.

- Fletcher, R. 1999. *Ramie: The Different Bast Fibre Crop*. Australian New Crops Newsletter. <http://www.newcrops.uq.edu.au/newslett>
- Hughes, R.L (et.al.). 1999, *Leadership: Enhancing the Lessons of Experience*. Boston: Irwin/McGraw-Hill.
- Islam, I., and Nazara, 2000. *Estimating Employment Elasticity for the Indonesian Economy, Technical Note on the Indonesian Labour Market*. International Labour Office
- Jewell.L.N, Siegall Marc, 1990. *Psikologi Industri/Organisasi Modern*, Arcan, Jakarta
- Kapteyn, A. and Alessie R., 1988. "Preference Formation, Incomes and the Distribution of Welfare", *Journal Behavior Economics*, 17, pp.77-96
- Khadduri, Majid, 1984. *The Islamic Concept of Justice* (Baltimore, Johns Hopkins, 1984); and Munawar Iqbal, ed., *Distributive Justice and Need Fulfillment in an Islamic Economy* (Leicester, U.K.: The Islamic Foundation, 1988).
- Khan, M. Fahim 1989. *Financial Modernization in 21st Century and Challenge for Islamic Banking*, International Journal of Islamic Financial Services, Volume 1, Number 3, Oct-Dec.
- Khaldun, Ibn, 2000. *Muqaddimah*. Alih bahasa Ahmadie Thaha. Pustaka Firdaus Jakarta
- Mannan, Abdul, 1997. *Islamic Economics, Theory and Practice*, diterjemahkan oleh.M. Nastangin. Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Dana Bahakti Wakaf, Yogyakarta, hal. 281
- Nowack, Kenneth, 2004. *Does Leadership Practise Affect a Phsicologically Heallty Workplace*, Working Paper, Consulting Tool Inc

- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Daurul Qiyam wa al-Akhlak fi al-Iqtishad al-Islami (Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam)*, terj. Didin Hafidhuddin dkk., Jakarta, Robbani Press
- Rahardjo, Dawam, 2002. *Sejarah Ekonomi Islam*, The International Institute of Islamic Thought, Jakarta, Indonesia
- Rahman, Yahia Abdul. 1999, *Islamic Instruments for Managing Liquidity*, International Journal of Islamic Financial Services, Volume 1, Number 1, Apr-Jun
- Van Praag, B.M.S., 1968. *Individual Welfare Functions and Consumer Behavior: A Theory Rational Irrationality*. Amsterdam : North Holland Publishing Company.
- Yousef, Darwish. 1998. "Satisfaction with job security as a predictor of organizational commitment and job performance in a multicultural environment". *International Journal of Manpower*, 19(3): 1-13.
- Zadjuli, Suroso Imam, 1999. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* , Surabaya: FE Univwesitas Airlangga
- Zallum, Abdul Qadim. 1983. *Al Amwal fi Daulatil Khilafah*. Darul Ilmi lil Malayin. Beirut. cetakan I,
- Zuhaili, Wahbah 1986. *Ushul Fiqh Islamy*, Damaskus: Dar al Fikr

INDEKS

A

ad-Din, 2
akademisi, 4
akhlak al kariim, 15
Aktualisasi diri, 2
al-Aql, 2
al-Maal, 2
an-Nafs, 2
an-Nasl, 2
aqidah, 1, 53, 72, 73, 88
aspek, 2, 3, 19, 34, 39, 46, 52, 56, 60, 70
azas, 16, 66, 88

B

batin, 2, 16, 46, 70
behavior, 8
berbasis, 3
berikhtiar, 2
berimplikasi, 1
berinteraksi, 8
berpedoman, 2, 55
bijaksana, 13

C

change, 20
concern, 1

D

dakwah, 15, 79, 81, 82
dedikasi, 14
demokratik, 8

demokratis, 17
dialokasikan, 3
diaplikasikan, 13, 14, 15, 32, 48
didominasi, 10, 68
difokuskan, 4
dimensi, 9, 18, 48, 67, 88
Dinamika, 8, 29
direktif, 8
direpresentasikan, 17
distribusi, 2, 3, 19, 20, 31, 32, 33, 34, 53, 60, 61, 62, 64, 66,
68, 80, 81, 82, 83, 84, 85
diterjemahkan, 14, 16, 91
dusta, 10

E

efektifitas, 8, 9
efisien, 2, 53, 62, 77
efisiensi, 19, 26
egoisme, 13
ekonomi mikro, 19, 68
eksplisit, 7, 24, 56, 80
eksternal, 9, 17
elit, 7
emosional, 13
esensi, 54
ethical values, 20, 32
etika, 2, 10, 20, 32, 62, 65, 67, 88
exchange, 21, 32

F

falah, 2, 46, 70
fathonah, ,1,13, 15, 59, 76
Fenomena, 3, 23
filosofi, 19
formal, 9

H

halal, 2, 40, 44
halalan thoyyiban, 10
harfiah, 13
Holistic, 3, 50

I

ideal, 13, 24
idendifikasi, 3, 48
identitas, 14
ideologi, 2, 23, 53, 62
Ikhsan, 8
indikasi, 2, 56
individu, 6, 19, 24, 27, 28, 31, 32, 51, 57, 62, 65, 66, 67, 68, 84, 85, 87
informasi, 3, 48
infrastruktur, 3, 67, 87
inovasi, 3, 75
inspirasi, 14
integritas, 7, 11
intelektual, 13
intensif, 14
istiqamah, 15, 16, 66
Istiqamah, 1, 16

J

jasmani, 1, 53, 57

K

kaffah, 3
kapital, 19
kapitalisme, 20, 23, 24, 26
karakter, 6, 9, 10, 13, 15, 18, 29, 50, 59, 72, 76, 88
Karakteristik, 9
kearifan, 13

keberlangsungan, 2, 53, 62
kecerdikan, 13
kemaslahatan, 2, 47, 78
kesejahteraan, 1, 2, 3, 4, 8, 19, 20, 22, 31, 36, 47, 48, 51,
53, 56, 61, 62, 63, 65, 67, 68, 70, 71, 79, 85, 87, 88
kesenjangan, 21, 33, 68
Khalifah, 2, 16, 46, 70
kinerja, 3, 21, 33, 48, 60, 63
kolektif, 2, 53, 62
komitmen, 9, 22, 23, 24, 43, 60, 61, 80, 81
komoditi, 20
komponen, 20, 23
Komunikatif, 14
konsisten, 16, 48, 66
konteks, 14
kontribusi, 21, 33, 36, 69
Konvensional, 1, 19
krisis, 17
Kriteria, 2, 53, 62
kualitas, 16, 48, 60, 63, 66, 67, 71, 88

L

Leader, 8
Leadership, 6, 8, 59, 90, 91
loyalitas, 14

M

Macro, 3, 50, 69
manajemen, 4, 64, 66
materi, 21, 33, 39, 40, 41, 53, 54
material, 2, 53, 56, 64
mayoritas, 15, 23, 78
memiliukan, 15
mendefinisikan, 6, 47
mengadaptasi, 17
mengalokasikan, 2, 53, 62

mengartikulasikan, 7
mengharmonisasikan, 7
mengkomunikasikan, 14
meniti, 10
menstruktur, 6
merealisasikan, 14, 85
modern, 20, 32
moral, 2, 10, 22, 26, 53, 62, 76
motivasi, 9, 26, 40
mubalaghah, 9

N

need, 20, 32
Normative, 3, 50

O

obyektif, 2, 13, 47, 51
organisasi, 6, 9, 17, 23, 48, 59, 62, 63, 65, 67, 87
orientasi, 13, 52
output, 20

P

Pangan, 2
penerapan, 4, 13, 70
perseptif, 7
persepsi, 3, 48, 67, 79, 87
pilar, 21
politik, 19, 22, 23, 29, 30, 76
power, 20, 32, 33
prinsip, 7, 10, 16, 22, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 42, 43, 61, 64, 67, 80, 83, 91
prioritas, 2, 53, 62
produktivitas, 2, 53, 62
profesi, 10, 13, 14, 15
profesional, 10, 13, 14, 15, 74
proporsional, 6, 13, 28, 31

punishment, 17

R

redistribusi, 20, 31, 32, 33, 34

referensi, 4, 47

relasi, 6

reward, 17

rezki, 2, 27, 36

ridha, 5, 15

risalah, 14

rohani, 1, 53, 57

S

Sandang, 2

sederajat, 3, 50

sektor, 22, 30

sentral, 19

shadiq, 9

shiddiq, 9, 15, 59, 71, 75

sirkulasi, 20, 32, 61

sistem, 20, 21, 23, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 46, 60, 80, 82, 84

social system, 20, 32

sosial, 17, 19, 20, 22, 25, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 60, 61, 68, 83

spiritual, 2, 13, 23, 46, 52, 53, 56, 64, 70, 88

stabilitas, 2, 53, 62, 64

Struktur, 9, 19

Subordinate, 9

subyektif, 2, 47, 51

sumberdaya, 2, 19, 24, 26, 31, 33, 53, 62, 68

suportif, 8

syariah, 2, 3, 35, 46, 47, 55, 63, 70

T

Tabligh, 1, 14, 15, 59, 76

takwa, 1, 2,8,59, 60, 72
Taraf, 15
tauladan, 17
tema, 19, 80, 81
teori, 8, 20, 32, 68, 69,79, 90, 91
terkorup, 15
thoyib, 2
Tinjauan, 1, 19, 21

U

universal, 2, 23, 24, 52, 53, 62

V

visioner, 15, 67, 76
Visioner, 1, 17

Z

zalim, 20, 40, 82